



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY (NFA)

# **PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN**

## **FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

### **TAHUN 2024**

**(Data Indikator Tahun 2023)**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY (NFA)

# **PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN**

***FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS***  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TAHUN 2024**

**(Data Indikator Tahun 2023)**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan Pasir Panjang – Kumpai Batu No. 09 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74117  
e-mail: [dkp.kobar@gmail.com](mailto:dkp.kobar@gmail.com). Website : [dkp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://dkp.kotawaringinbaratkab.go.id)

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS - FSVA)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2024**

Dibuat Oleh :

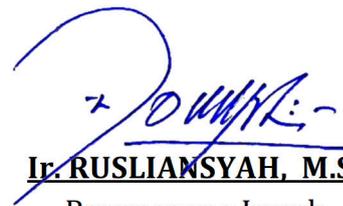
Disetujui Oleh :



**ADRIAN NOR, SP, MM**

Ketua

Tim FSVA Kabupaten Kotawaringin Barat



**Ir. RUSLIANSYAH, M.Si**

Penanggung Jawab

Tim FSVA Kabupaten Kotawaringin Barat

## TIM PENYUSUNAN

### PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS – FSVA) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

Penanggung Jawab	:	Ir. RUSLIANSYAH, M.Si
Ketua	:	ADRIAN NOR, SP, MM
Sekretaris	:	RADITYO, SP
Anggota	:	ADI SUSILO, SP,MM
Anggota	:	PIET DONO, SE
Anggota	:	AGUS NDARU PRATOMO, SST, MT
Anggota	:	FRINNA SHINTA, S.Hut, MM
Anggota	:	NOMIE HARTATI, ST
Anggota	:	WIRO BUDI PONCO PUTRANTO
Anggota	:	ABDUL HALIM
Anggota	:	HENDRO PURNOMO
Anggota	:	MULYADI, A.Md. Kes
Anggota	:	DESSY TRIASTUTY, A.Md
Anggota	:	MISNO AGUS HARIANTO
Anggota	:	AHMAD RAFI'I S.Hut., M.Si
Anggota	:	AGUSTINUS ABEL, SP
Anggota	:	NURUL HUDA, SP
Anggota	:	SUDIRMAN
Anggota	:	DIDIK SUWARNO, SP
Anggota	:	ROMY AGUS SYAPUTRA, SP



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 100.3.2/106/DPKP/Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 30 Desember 2024

P. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



BUDI SANTOSA

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

***NOMOR 100.3.2/106/DPKP/Tahun 2024***

**TENTANG**

**PENETAPAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI .....	2
1.3. METODOLOGI .....	5
<b>BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN .....</b>	<b>10</b>
2.1. LAHAN PERTANIAN .....	10
2.2. PRODUKSI .....	12
2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI .....	17
2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN .....	20
<b>BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN .....</b>	<b>22</b>
3.1. PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH .....	22
3.2. AKSES TRANSPORTASI .....	25
3.3. STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN .....	27
<b>BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN.....</b>	<b>29</b>
4.1. AKSES AIR BERSIH .....	29
4.2. RASIO TENAGA KESEHATAN .....	32
4.3. DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN .....	35
4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN .....	36
<b>BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT .....</b>	<b>40</b>
5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN .....	40
5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN .....	43
<b>BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN .....</b>	<b>45</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator FSVA Kabupaten 2022 .....	5
Tabel 1.2	Bobot Indikator Individu .....	7
Tabel 1.3	Pola warna berdasarkan tingkatan kerentanan .....	8
Tabel 2.1	Sebaran desa pada rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan skala prioritas .....	10
Tabel 2.2	Sebaran jumlah desa/kelurahan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk per kecamatan .....	12
Tabel 2.3	Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton) .....	13
Tabel 2.4	Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2019-2023) .....	13
Tabel 2.5.	Produksi Padi 2019 - 2023 (Ton) .....	14
Tabel 2.6.	Produksi Jagung 2019 - 2023 (Ton) .....	15
Tabel 2.7.	Produksi Ubi Kayu 2019 - 2023 (Ton) .....	16
Tabel 2.8.	Produksi Ubi Jalar 2019 - 2023 (Ton) .....	16
Tabel 2.9.	Sebaran desa pada rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan skala prioritas ...	17
Tabel 2.10.	Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan .....	18
Tabel 3.1.	Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat .....	22
Tabel.3.2.	Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa per kecamatan .....	22
Tabel 3.3.	Sebaran desa pada rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa berdasarkan skala prioritas .....	23
Tabel 3.4.	Sebaran desa/kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai berdasarkan skala prioritas .....	25
Tabel 4.1.	Sebaran jumlah desa indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan skala prioritas .....	29
Tabel 4.2.	Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan .....	30
Tabel 4.3.	Sebaran jumlah desa pada rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk berdasarkan skala prioritas .....	32

Tabel 4.4.	Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk per kecamatan .....	33
Tabel 4.5.	Rekapitulasi penderita gizi buruk tahun 2019-2023 perkecamatan ....	35
Tabel 4.6.	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan tahun 2023 .....	36
Tabel 5.1.	Sebaran jumlah desa/kelurahan secara komposit berdasarkan skala prioritas .....	40
Tabel.5.2.	Sebaran jumlah desa/kelurahan berdasarkan analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan per kecamatan .....	41
Tabel 5.3.	Faktor yang mempengaruhi di daerah rentan pangan berdasarkan bobot .....	43
Tabel 5.4.	Rata-rata Skor Indikator Individu, Indeks Ketersediaan, Indeks Akses, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Komposit di Prioritas Rentan (1 - 3) .....	43
Tabel 5.5.	Rata-rata Skor Indikator Individu, Indeks Ketersediaan, Indeks Akses, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Komposit di Prioritas Tahan (4 - 6) .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi .....	3
Gambar 2.1	Peta Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat .....	11
Gambar 2.2	Persentase skala prioritas pada rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk per skala prioritas .....	12
Gambar 2.3.	Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton) .....	13
Gambar 2.4.	Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2019-2023) .....	14
Gambar 2.5.	Sebaran Produksi Padi 2019 - 2023 (Ton) Setiap Kecamatan .....	14
Gambar 2.6.	Produksi Jagung 2019 - 2023 (Ton) .....	15
Gambar 2.7.	Produksi Ubi Kayu 2019 - 2023 (Ton) .....	16
Gambar 2.8.	Produksi Ubi Jalar 2019 - 2023 (Ton) .....	17
Gambar 2.9.	Persentase skala prioritas pada rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga Kabupaten Kotawaringin Barat .....	18
Gambar 2.10.	Peta Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Barat ..	19
Gambar 3.1.	Persentase skala prioritas pada rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa....	23
Gambar 3.1.	Peta Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Koatawaringin Barat .....	24
Gambar 3.2.	Peta Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Kabupaten Kotawaringin Barat .....	26
Gambar 4.1.	Persentase skala prioritas pada rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga .....	30
Gambar 4.2.	Peta Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Barat .....	31
Gambar 4.3.	Persentase skala prioritas pada rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk .....	33
Gambar 4.4.	Peta Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat .....	34
Gambar 4.5.	Penderita gizi buruk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019-2023 .....	35
Gambar 4.6.	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan tahun 2023 .....	36
Gambar 5.1.	Persentase jumlah desa/kelurahan tahan dan rentan rawan pangan secara komposit .....	41

Gambar 5.2.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit Kabupaten Kotawaringin Barat .....	42
Gambar 6.1.	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator dan Prioritas Komposit. ....	49
Lampiran 2. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Data Rasio Per Indikator .....	52
Lampiran 3. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Skor Individu Per Indikator .....	55
Lampiran 4. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Angka indeks Per Aspek .....	58
Lampiran 5. Peta per desa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat 2024 .....	61

## KATA PENGANTAR

Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) menjadi salah satu instrumen dalam mengelola krisis pangan dan gizi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan sangat diperlukan sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam merencanakan kebijakan dan program. Ketersediaan informasi dan data yang tepat akan memudahkan dalam menetapkan prioritas intervensi program.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah ***Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*** sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 merupakan hasil kerja Tim FSVA Kabupaten Kotawaringin Barat, dan pendanaannya dibebankan pada Anggaran (DIPA) Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk secara tepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti layanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Dalam hal ini sangat penting artinya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan khususnya yang menyangkut masalah pangan dan gizi serta diversifikasi pangan.

Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 ini tidak terlepas dari peran aktif semua pihak yang dengan penuh rasa tanggung jawab mulai dari pengumpulan, mengolah dan menganalisa data yang diperlukan. Saran dan kritik membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Pangkalan Bun, Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Kotawaringin Barat,



**Dr. RUSLIANSYAH, M.Si**  
NIP. 19660726 199303 1 004

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN**  
**FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) 2024**

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis Komposit FSVA 2024 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 1 desa dari 94 desa/kelurahan yang terdiri dari 1 desa (1%) Prioritas 3. Desa prioritas 3 desa Sungai Cabang di kecamatan Kumai.

7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan :
  - a. Lahan pertanian yang masih kurang produktif dan tidak optimal,
  - b. Tingginya jumlah penduduk yang tidak sejahtera,
  - c. Banyaknya rumah tangga tanpa akses air bersih,
  - d. Kurangnya tenaga kesehatan, dan
  - e. Jumlah sarana penyedia pangan yang kurang mencukupi.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
  1. Pengembangan lahan sawah, optimalisasi penggunaan lahan, mengimbangi alih fungsi lahan, pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi, peningkatan produktivitas, pengolahan/perbaikan tanah, Memperkuat pengawasan peningkatan produktivitas pertanian, Penguatan kelembagaan petani, dan Pengurangan dampak iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
  2. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
  3. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi, penyuluhan dan pembangunan fasilitas air bersih.
  4. Penyediaan tenaga Kesehatan, fasilitas tenaga Kesehatan, Peningkatan kualitas layanan Kesehatan, pemenuhan gizi dan Kesehatan keluarga, dan penanganan stunting.
  5. Pengembangan dan pembangunan sarana perekonomian berupa fasilitas pasar dan pertokoan di tingkat desa/kelurahan, serta penyediaan fasilitas pasokan bahan pangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas 6 kecamatan dan 94 desa. Tidak ada pemekaran wilayah kecamatan ataupun desa yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Kabupaten Kotawaringin Barat diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1959. Kabupaten yang terletak di antara tiga wilayah, yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Seruyan ini memiliki luas wilayah sebesar 10.759 km<sup>2</sup> atau 7,01 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat secara geografis terletak antara 1° 19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur.

Selama 2023 memiliki curah hujan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Maret dengan curah hujan sebesar 344,0 mm dan terendah pada bulan Agustus yaitu 61,0mm, dengan jumlah hari hujan sepanjang tahun sebanyak 177 hari. Berdasarkan data dari BMKG, rata-rata kelembaban udara paling rendah terjadi pada bulan September dengan 37,00 persen dan yang paling tinggi pada bulan Maret dan April dengan 86,00 persen.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu wilayah yang beriklim tropis sehingga mendapatkan rata-rata penyinaran matahari per bulan sekitar 4,3-6,8 jam per hari. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 36,5 °C dan rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan September sebesar 18,6°C dan kecepatan angin rata-rata per bulan bervariasi antara 1,6 knot sampai 3,9 knot. (*Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2024, BPS*).

PDRB per kapita Kotawaringin Barat menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB per kapita 2022 sebesar 94,97 juta rupiah naik pada tahun 2023 menjadi sebesar 102,06 juta rupiah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha Kotawaringin Barat yang terus berkembang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, keadaan ekonomi Kotawaringin Barat sudah mulai pulih dan terus meningkat hingga tahun 2023. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,01 persen meningkat menjadi 6,10 pada tahun 2023.

Kontribusi pembentukan PDRB Kotawaringin Barat tahun 2023 didominasi oleh empat lapangan usaha unggulan. Sektor terbesar yaitu industri pengolahan sebesar 26,82 persen; disusul oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,72 persen; perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,27 persen dan konstruksi sebesar 7,85 persen, berdasarkan data Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2024.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang

terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2024.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

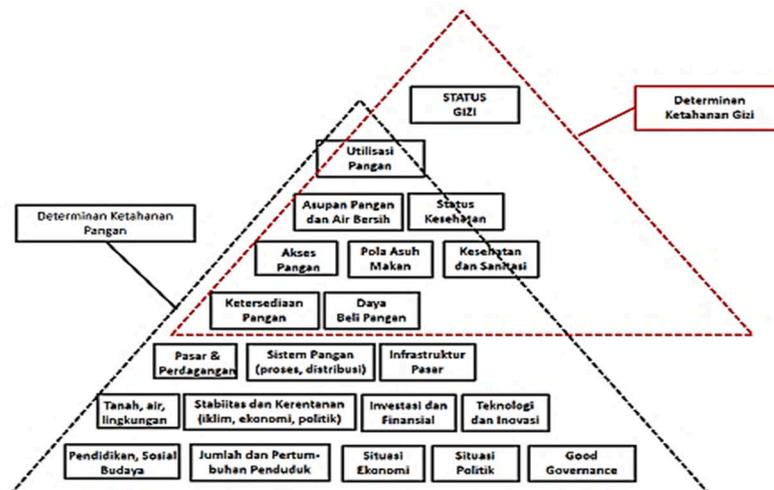
## **1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI**

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (food security) yang dianut oleh Food and Agricultural Organisation (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal food security yang dihasilkan oleh World Food Summit tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya nutrition security yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai Food and Nutrition Security. Pada tahun 2012 FAO<sup>1</sup> mengajukan definisi food security menjadi food and nutrition security untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya Standing Committee on Nutrition (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013<sup>2</sup> juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (food security) menjadi ketahanan pangan dan gizi (food and nutrition security). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Sumber: FAO dan UNSCN)

<sup>1</sup> Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

<sup>2</sup> Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

**Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

**Akses pangan** adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

**Pemanfaatan pangan** merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

**Dampak gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

**Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga

pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### 1.3. METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

#### 1.3.1. Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2024

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>A. Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BAPPEDALITBAG 2023 (RTRW Kab. Kobar Tahun 2017-2037),</li> <li>▪ DISTAN KOBAR 2023 (Lahan Baku Sawah),</li> <li>▪ DISDUKCAPIL KOBAR 2023 (Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023)</li> </ul>
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPS KOBAR 2021 (Pendataan Potensi desa),</li> <li>▪ DPMD KOBAR 2023 (Indeks Desa Membangun),</li> <li>▪ DISDUKCAPIL KOBAR 2023 (Data Agregat</li> </ul>

Indikator	Definisi	Sumber Data
		Kependudukan Semester II Tahun 2023)
<b>B. Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dibandingkan jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DINSOS KOBAR 2023 (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS),</li> <li>▪ DISDUKCAPIL KOBAR 2023 (Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023)</li> </ul>
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.); (3) Dapat dilalui selama musim kemarau; (4) Tidak dapat dilalui sepanjang tahun.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BAPPEDALITBANG KOBAR 2023 (Indeks Desa Membangun /IDM Kemendesa)</li> </ul>
<b>C. Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DINKES KOBAR 2023 (Program Kesehatan Lingkungan dan Puskesmas),</li> <li>▪ DISDUKCAPIL KOBAR 2023 (Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023)</li> </ul>
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) Dokter gigi; 3) Bidan; 4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DINKES KOBAR 2023 (Renbut Nakes dan Aplikasi SI-SDMK),</li> <li>▪ DISDUKCAPIL KOBAR 2023 (Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023)</li> </ul>

### 1.3.2. Metode Analisis

#### 1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

#### 2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)* dalam penyusunan *Global Food Security Index (EIU 2016 dan 2017)* dan *International Food Policy Research Institute (IFPRI)* dalam penyusunan *Global Hunger Index (IFPRI 2017)*. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- $Y_j$  : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- $a_i$  : Bobot masing-masing indikator
- $X_{ij}$  : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6

6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

- $K_j$  : *cut off point* komposit ke-J
- $a_i$  : Bobot indikator ke-i
- $C_{ij}$  : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan berdasarkan *cut off point* komposit ke dalam 6 prioritas, pada 2 kelompok, yaitu :

1. Kelompok rentan rawan pangan yang terdiri dari Prioritas 1 (rentan rawan pangan tinggi), Prioritas 2 (rentan rawan pangan sedang) dan Prioritas 3 (rentan rawan pangan rendah).
2. Kelompok tahan pangan yang terdiri dari Prioritas 4 (tahan pangan rendah), Prioritas 5 (tahan pangan sedang) dan Prioritas 6 (tahan pangan tinggi).

Berdasarkan hal tersebut, wilayah yang masuk ke dalam kelompok Prioritas 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok Prioritas 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

Metode analisis FSVA menggunakan metode pembobotan. Peta-peta FSVA menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau yang dikelompokkan menjadi 6 warna.

Tabel 1.3. Pola warna berdasarkan tingkatan kerentanan

Warna	Keterangan
1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Agak Rentan
4	Agak Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

### 1.3.3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

## BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

### 2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan<sup>3</sup>. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

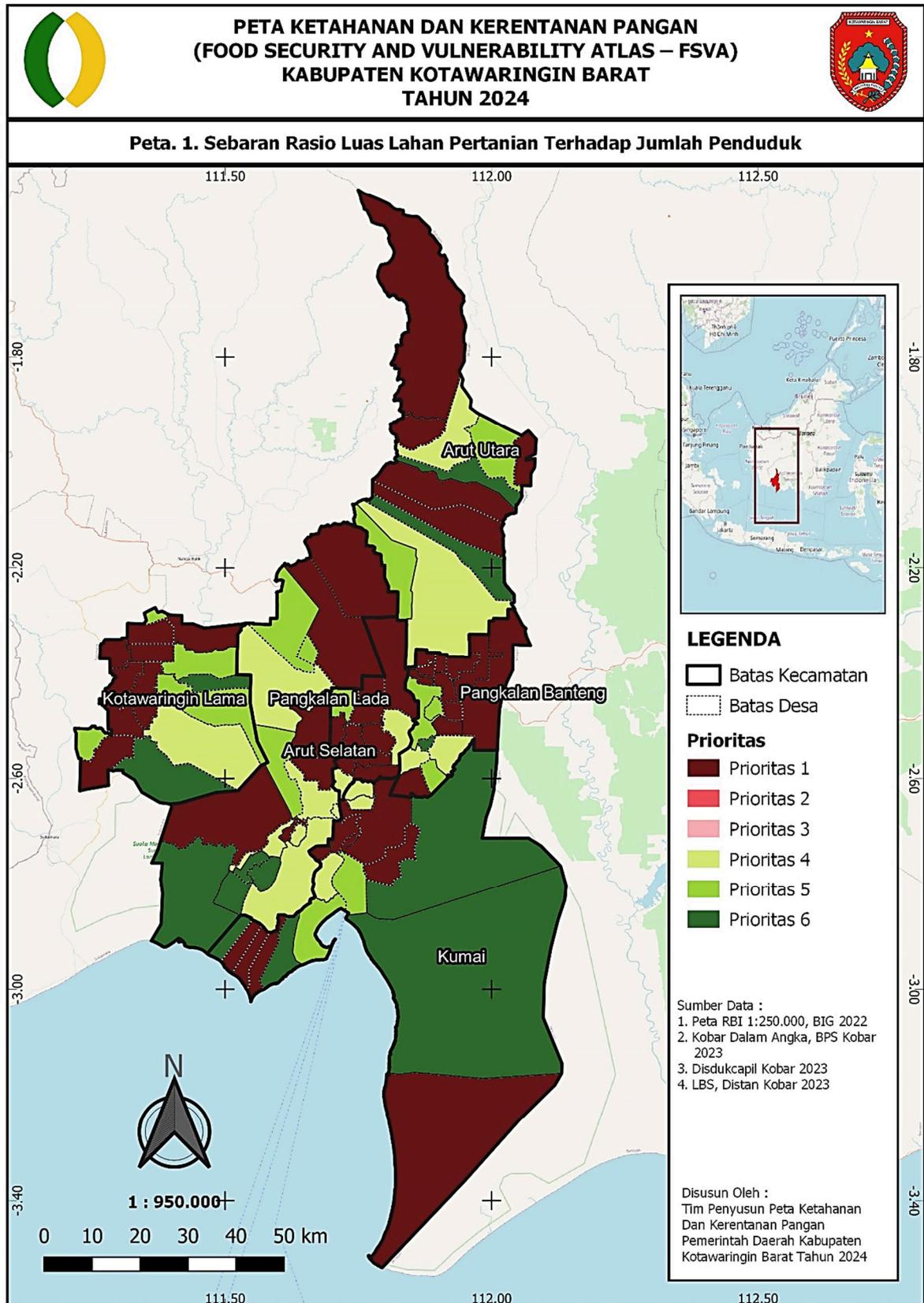
Dari 94 desa/kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 50 desa masuk dalam prioritas 1 (53 %), Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1 sebagian besar tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kumai (9 desa), Arut Selatan (7 desa), Kotawaringin Lama (10 desa), Arut Utara (5 desa), Pangkalan Lada (8 desa) dan Pangkalan Banteng (11 desa). Dengan Total keseluruhan sebanyak 50 desa. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya lahan sawah dengan adanya peningkatkan jumlah desa yang tidak memiliki lahan sawah dibandingkan pada tahun 2022.

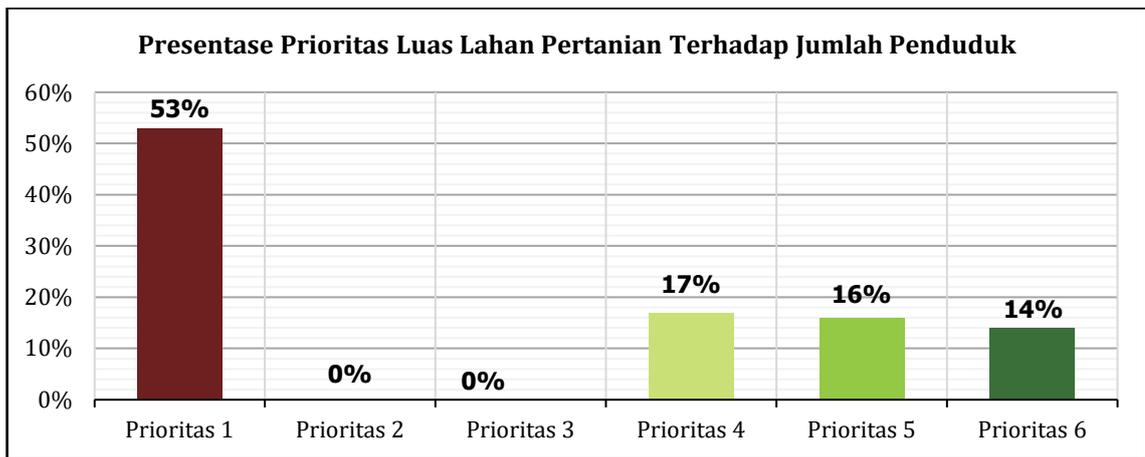
Tabel 2.1. Sebaran desa pada rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio Luas Lahan	Jumlah Desa
1	$\leq 0,0000$	50
2	$> 0,0000 - 0,0000$	0
3	$> 0,0000 - 0,0000$	0
4	$> 0,0000 - 0,0141$	16
5	$> 0,0141 - 0,0672$	15
6	$> 0,0672$	13

<sup>3</sup> Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor

Gambar 2.1. Peta Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat





Gambar 2.2. Persentase skala prioritas pada rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk per skala prioritas

Rata-rata rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah 0,0486 dimana rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk terbaik adalah sebesar 1,0823 di Kecamatan Kumai (Desa Teluk Pulau). Sedangkan, rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk rasio terburuk adalah 0,0000 tersebar di Kecamatan 6 kecamatan dengan jumlah 50 desa.

Dari hasil analisis berdasarkan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk beberapa kecamatan yang memerlukan perhatian lebih karena seluruh desa/kelurahannya termasuk dalam kategori rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3). Rekapitulasi sebaran jumlah desa/ rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk per kecamatan disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sebaran jumlah desa/kelurahan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk per kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas						Total
		1	2	3	4	5	6	
1	Kumai	9	0	0	3	2	4	18
2	Arut Selatan	7	0	0	6	3	4	20
3	Kotawaringin Lama	10	0	0	1	4	2	17
4	Arut Utara	5	0	0	2	2	2	11
5	Pangkalan Lada	8	0	0	2	1	0	11
6	Pangkalan Banteng	11	0	0	2	3	1	17
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>94</b>

## 2.2. PRODUKSI

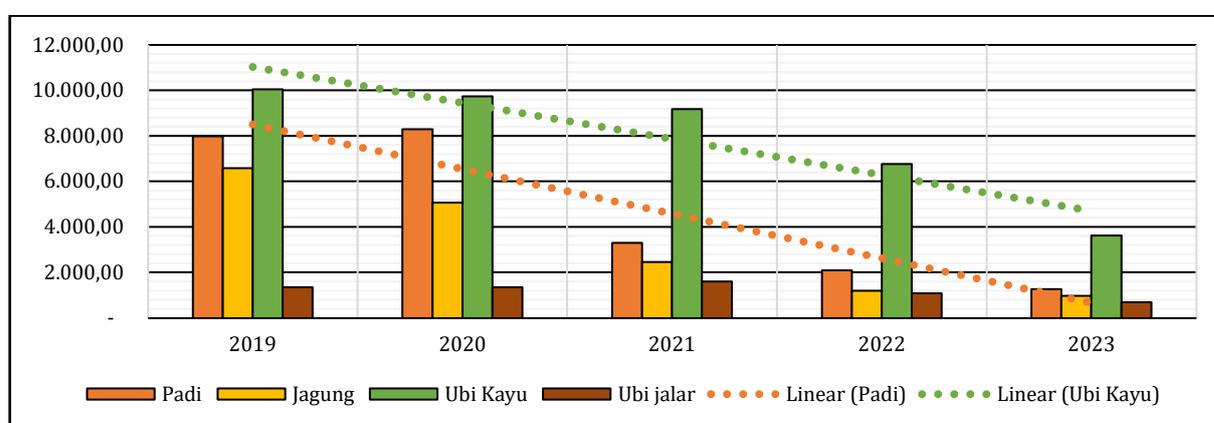
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 26,72% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Padi dan ubi kayu merupakan bahan pokok yang menyumbang produksi sereal dan umbi-umbian terbesar di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019-2023, yaitu padi sebesar 27,1% dan ubi kayu sebesar 46,5%. Produksi sereal pokok dan umbi-umbian per tahun disajikan pada tabel 2.3. dan gambar 2.3.

Tabel 2.3. Produksi Sereal Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

Sereal	Produksi (Ton)					Rata-rata 5 tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	
Padi	7.975,20	8.292,32	3.290,08	2.094,53	1.268,84	4.584,19
Jagung	6.574,70	5.066,99	2.451,38	1.192,61	972,06	3.251,55
Ubi Kayu	10.048,20	9.740,58	9.179,91	6.767,87	3.622,08	7.871,73
Ubi jalar	1.347,30	1.350,61	1.604,95	1.083,15	694,55	1.216,11
<b>Jumlah</b>	<b>25.945,40</b>	<b>24.450,50</b>	<b>16.526,33</b>	<b>11.138,16</b>	<b>6.557,53</b>	<b>16.923,58</b>

Sumber: Statistik Pertanian 2019-2023, Dinas Pertanian Kab.Kotawaringin Barat



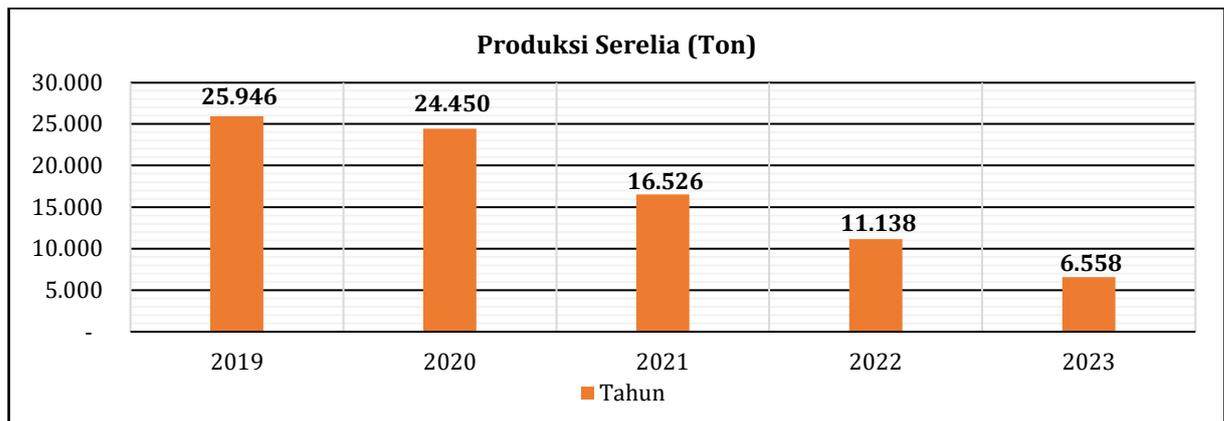
Gambar 2.3. Produksi Sereal Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

Tahun 2023, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 6.557,53 ton terdiri dari padi 1.268,84 ton, jagung 972,06 ton, ubi kayu 3.622,08 ton dan ubi jalar 694,55 ton. Total produksi sereal dan laju pertumbuhan produksi tahun 2019-2023 menunjukkan Menurunan sebesar -75% sehingga tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari total produksi tahun 2022 sebesar 11.138,16 ton menjadi 6.557,53 ton pada tahun 2023. Sebaran total produksi sereal selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 25.945 ton dan terkecil pada tahun 2023 Produksi sereal pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan gambar 2.4.

Tabel 2.4. Produksi Total Sereal per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2019-2023)

Kecamatan	Produksi Total Sereal (ton)					Laju Pertumbuhan 2019-2023 (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Kotawaringin Lama	1.739	1.970	1.386	1.033	742	-57
2. Arut Selatan	6.243	4.983	2.821	1.232	928	-85
3. Kumai	6.511	5.459	3.280	2.290	1.202	-82
4. Pangkalan Banteng	5.083	5.798	5.773	5.156	2.990	-41
5. Pangkalan Lada	2.695	2.610	1.249	386	389	-86
6. Arut Utara	3.676	3.632	2.019	1.041	306	-92
<b>Jumlah</b>	<b>25.946</b>	<b>24.450</b>	<b>16.526</b>	<b>11.138</b>	<b>6.558</b>	<b>-75</b>

Sumber: Statistik Pertanian 2019-2023, Dinas Pertanian Kobar



Gambar 2.4. Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2019-2023)

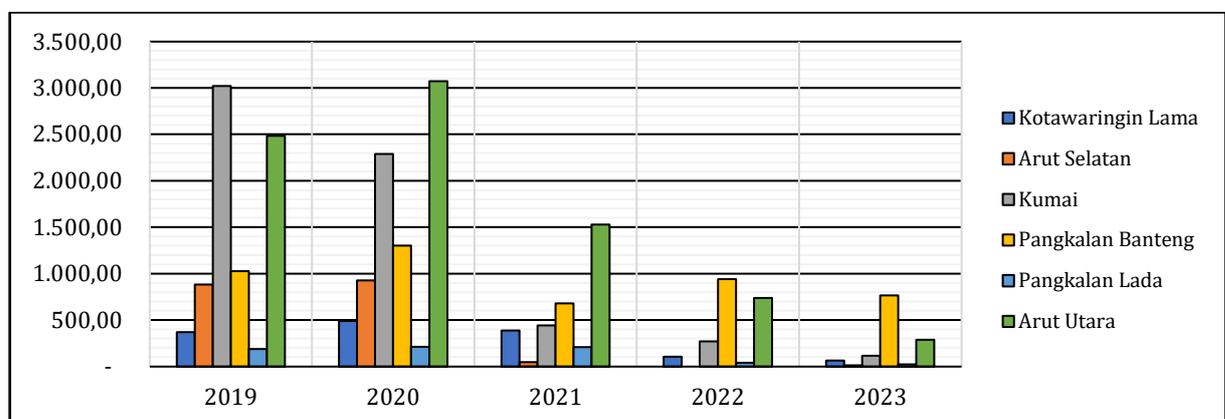
### 2.2.1. Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir (2019-2023) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.5. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2023 di rata-rata semua kecamatan. Penurunan Produksi padi tertinggi di kecamatan Arut Selatan, dengan Persentase total turunnya produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2019 ke 2023 sebesar 84%. Disajikan pada tabel 2.5 dan gambar 2.5.

Tabel 2.5. Produksi Padi 2019 - 2023 (Ton)

Kecamatan	Padi					Penurunan Produksi %
	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Kotawaringin Lama	371,23	488,85	388,03	104,47	65,44	82%
2. Arut Selatan	882,45	928,59	48,21	-	12,63	99%
3. Kumai	3.022,47	2.286,95	441,27	271,22	114,80	96%
4. Pangkalan Banteng	1.026,13	1.300,75	678,97	940,21	764,57	25%
5. Pangkalan Lada	188,82	213,40	206,57	40,75	22,39	88%
6. Arut Utara	2.484,15	3.073,79	1.527,02	737,88	289,01	88%
<b>Jumlah</b>	<b>7.975,25</b>	<b>8.292,33</b>	<b>3.290,07</b>	<b>2.094,53</b>	<b>1.268,84</b>	<b>84%</b>

Sumber: Statistik Pertanian 2019-2023, Dinas Pertanian Kobar



Gambar 2.5. Sebaran Produksi Padi 2019 - 2023 (Ton) Setiap Kecamatan

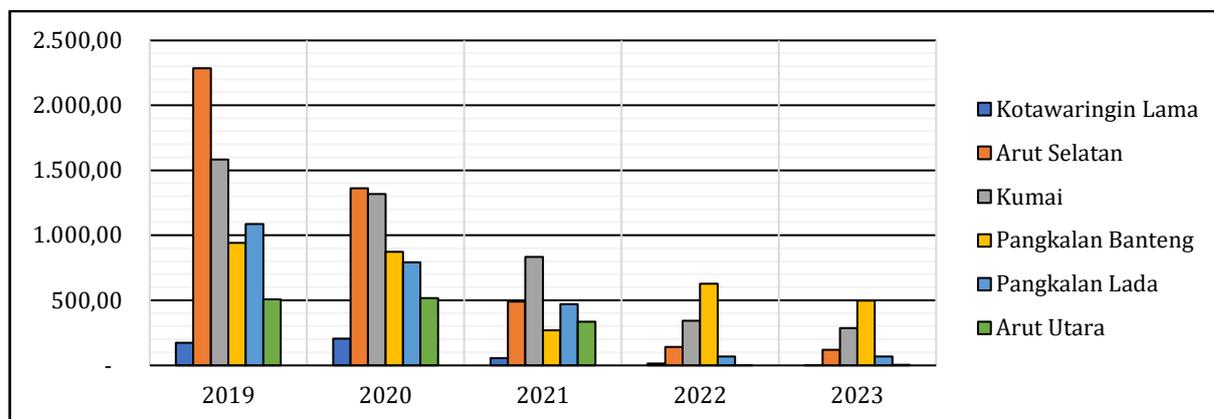
## 2.2.2. Jagung

Pada tahun 2023, produksi jagung mencapai 1.192,61 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan 85%. Penurunan produksi pada tahun 2023 disebabkan lahan eksis pertanaman yang semakin berkurang setiap tahunnya, selain itu juga minat akan petani untuk bertanam jagung berkurang. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 6.574,60 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Arut Selatan sebesar 2.286,10 ton, menyusul Kecamatan Kumai sebesar 1.582,80 ton dan terendah Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar 171,80 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.6 dan gambar 2.6.

Tabel 2.6. Produksi Jagung 2019 - 2023 (Ton)

Kecamatan	Jagung				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Kotawaringin Lama	171,80	204,31	55,02	13,47	2,00
2. Arut Selatan	2.286,10	1.361,82	489,48	141,22	117,76
3. Kumai	1.582,80	1.317,72	832,83	343,31	285,43
4. Pangkalan Banteng	940,30	873,72	268,95	626,25	496,01
5. Pangkalan Lada	1.086,70	791,97	471,00	67,86	66,87
6. Arut Utara	506,90	517,44	334,10	0,50	3,99
<b>Jumlah</b>	<b>6.574,60</b>	<b>5.066,98</b>	<b>2.451,38</b>	<b>1.192,61</b>	<b>972,06</b>

Sumber: Statistik Pertanian 2019-2023, Dinas Pertanian Kobar



Gambar 2.6. Produksi Jagung 2019 - 2023 (Ton)

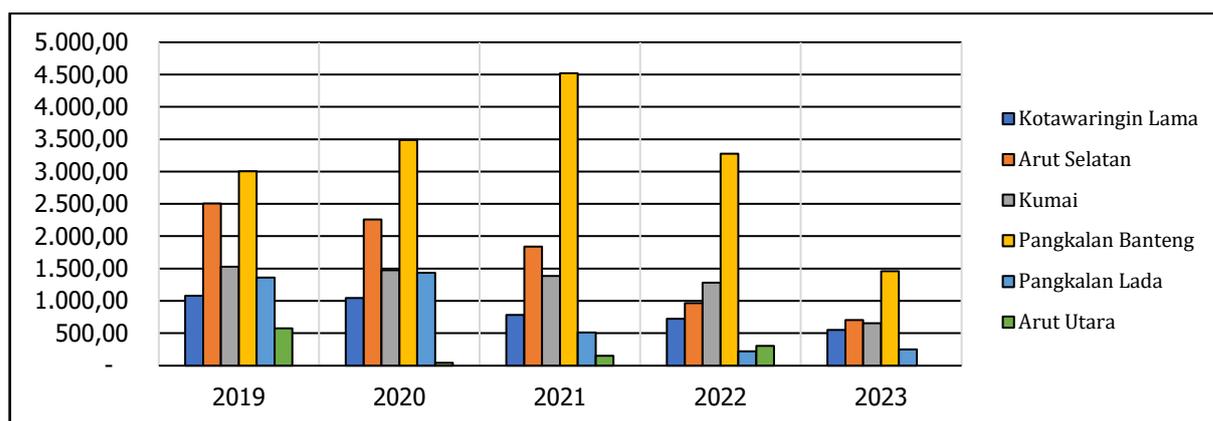
## 2.2.3. Ubi Kayu

Produksi ubi kayu menurun dari 10.648,25 ton pada tahun 2019 menjadi 6.767,87 ton pada tahun 2023. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2023 meliputi kecamatan Pangkalan Banteng, Kumai, Arut Selatan dan Kotawaringin Lama Rincian produksi ubi kayu tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.7 dan gambar 2.7.

Tabel 2.7. Produksi Ubi Kayu 2019 - 2023 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Kotawaringin Lama	1.077,00	1.043,86	780,69	723,88	551,66
2. Arut Selatan	2.507,80	2.260,77	1.837,07	963,38	705,04
3. Kumai	1.528,10	1.475,74	1.383,95	1.280,92	656,60
4. Pangkalan Banteng	3.001,90	3.487,96	4.517,62	3.277,64	1.458,52
5. Pangkalan Lada	1.360,10	1.431,88	510,45	220,66	250,26
6. Arut Utara	573,30	40,37	150,13	301,39	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.048,20</b>	<b>9.740,58</b>	<b>9.179,91</b>	<b>6.767,87</b>	<b>3.622,08</b>

Sumber: Statistik Pertanian 2019-2023, Dinas Pertanian Kobar



Gambar 2.7. Produksi Ubi Kayu 2019 - 2023 (Ton)

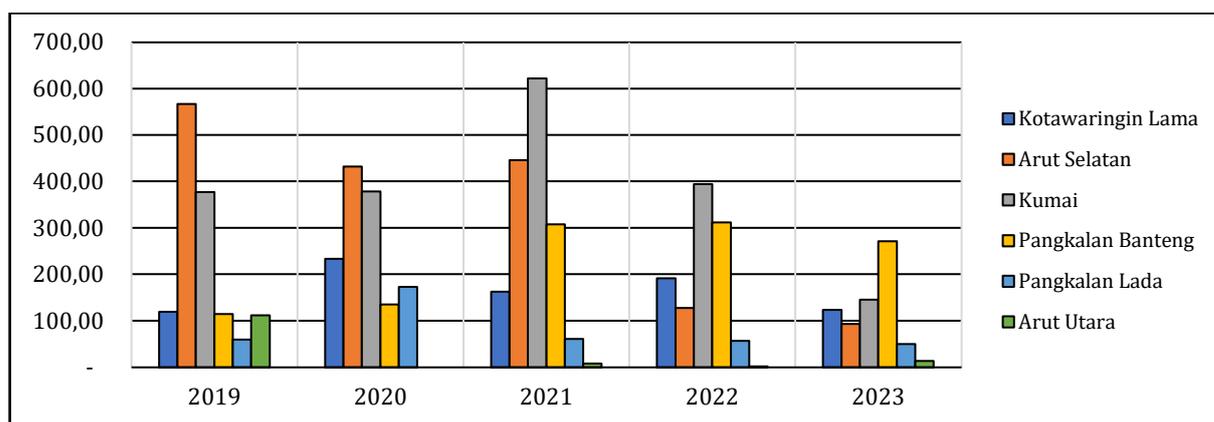
## 2.2.4. Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2019 - 2023) terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1.604,95 ton. Kecamatan Kumai merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 621,67 ton, Kecamatan Arut Selatan sebesar 445,82,73 ton, Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar 307,12 ton dan Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar 162,23 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2019 - 2023 disajikan pada Tabel 2.8 dan gambar 2.8.

Tabel 2.8. Produksi Ubi Jalar 2019 - 2023 (Ton)

Kecamatan	Ubi Jalar				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Kotawaringin Lama	118,80	233,22	162,23	191,40	123,25
2. Arut Selatan	566,60	431,61	445,82	127,60	92,80
3. Kumai	377,20	378,14	621,67	394,40	145,00
4. Pangkalan Banteng	114,30	135,11	307,12	311,75	271,15
5. Pangkalan Lada	59,20	172,53	60,68	56,55	49,30
6. Arut Utara	111,20	-	7,43	1,45	13,05
<b>Jumlah</b>	<b>1.347,30</b>	<b>1.350,61</b>	<b>1.604,95</b>	<b>1.083,15</b>	<b>694,55</b>

Sumber: Statistik Pertanian 2019-2023, Dinas Pertanian Kobar



Gambar 2.8. Produksi Ubi Jalar 2019 - 2023 (Ton)

### 2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

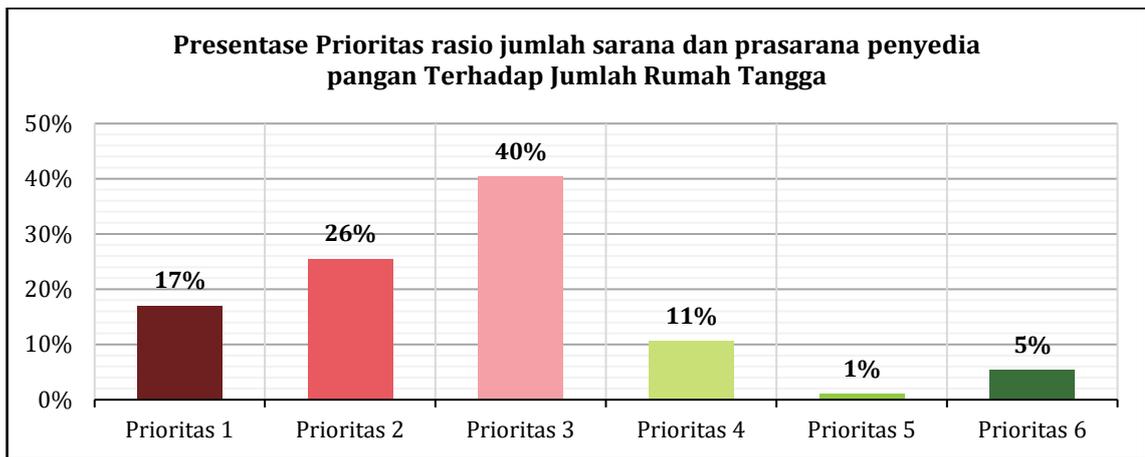
Dalam melakukan analisis indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga digunakan data di tingkat desa, sebagai berikut :

- Data jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan yang bersumber dari Podes tahun 2021 (BPS Kabupaten Kotawaringin Barat).
- Data jumlah penduduk yang bersumber dari Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 (DISDUKCAPIL Kabupaten Kotawaringin Barat).

Sebaran jumlah desa berdasarkan rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga untuk setiap prioritas disajikan pada tabel 2.9. Sedangkan, persentase rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga disajikan pada gambar 2.9.

Tabel 2.9. Sebaran desa pada rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio Saprpras Pangan	Jumlah Desa
1	$\leq 0,0239$	16
2	$> 0,0239 - 0,0380$	24
3	$> 0,0380 - 0,0545$	38
4	$> 0,0545 - 0,0685$	10
5	$> 0,0685 - 0,0816$	1
6	$> 0,0816$	5



Gambar 2.9. Persentase skala prioritas pada rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari gambar 2.9. menunjukkan 94 desa/kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebanyak 16 desa/kelurahan (17%) masuk prioritas 1, sebanyak 24 desa/kelurahan (26%) masuk prioritas 2, dan sebanyak 38 desa/kelurahan (40%) masuk prioritas 3.

Total desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sejumlah 78 desa atau 83%, dibandingkan prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) hanya sejumlah 16 desa atau 17%. Sehingga dapat dilihat Sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih sedikit tersedianya sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) terhadap rasio jumlah rumah tangga.

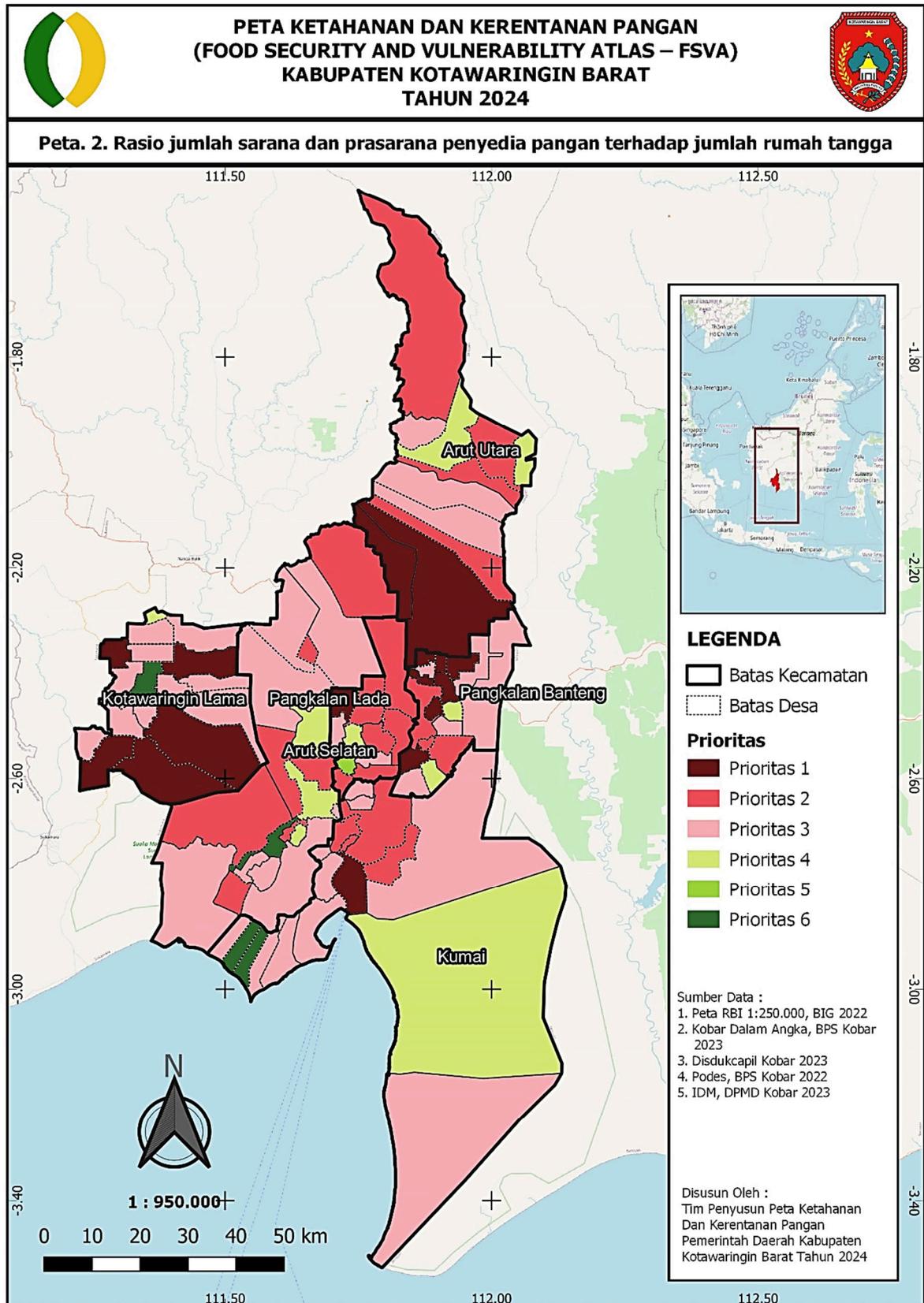
Berdasarkan hasil analisis untuk indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat terendah (rasio terburuk) adalah 0,0096 di Desa Sungai Bengkuang Kecamatan Pangkalan Banteng dan (rasio paling baik) adalah 0,1210 di Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan.

Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan disajikan pada tabel 2.10

Tabel 2.10. Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan.

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas					
		1	2	3	4	5	6
1	Kumai	1	4	10	1	0	2
2	Arut Selatan	0	7	8	3	0	2
3	Kotawaringin Lama	5	0	10	1	0	1
4	Arut Utara	2	4	3	2	0	0
5	Pangkalan Lada	1	6	2	1	1	0
6	Pangkalan Banteng	7	3	5	2	0	0
<b>Total</b>		<b>16</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Gambar 2.10. Peta Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Barat



## 2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2019-2023 mencapai -1,45% per tahun sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mengalami penurunan mencapai 84% dan 85%. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 2 ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 4,1496 Sementara itu laju konversi lahan sebesar 75% Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 83%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

### Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan dan Sarana Prasarana Penyedia Pangan

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, Kebijakan Perekonomian Daerah yaitu Pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Kebijakan kabupaten Kotawaringin Barat dalam memenuhi ketersediaan pangan pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian berupa Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian :
  - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
  - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui Pengembangan Prasarana Pertanian yaitu,
  - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.
  - Pembangunan Prasarana Pertanian : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan

- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya.
3. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian melalui Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota :
    - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
    - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
    - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
  4. Peningkatan Penyuluhan Pertanian yaitu :
    - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
    - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
    - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
    - Pembentukan Badan Usaha Milik Petani.
  5. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan melalui Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  6. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya berupa : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
  7. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting berupa Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

### BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya:

- (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi;
- (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau
- (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu:

- (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan
- (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

#### 3.1. PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami penurunan dari 9,72% tahun 2022 menjadi 8,35% tahun 2023 sehingga ada pengurangan sebesar 1,73%. Pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin	3,46%	4,37%	12,66%	9,72%	8,35%

*Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinsos*

Tabel.3.2. Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa per kecamatan.

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas						Total
		1	2	3	4	5	6	
1	Kumai	5	2	5	4	1	1	18
2	Arut Selatan	3	2	1	3	3	8	20
3	Kotawaringin Lama	0	0	0	3	1	13	17
4	Arut Utara	0	1	1	3	1	5	11
5	Pangkalan Lada	0	0	1	4	1	5	11
6	Pangkalan Banteng	1	0	1	5	3	7	17
<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>94</b>

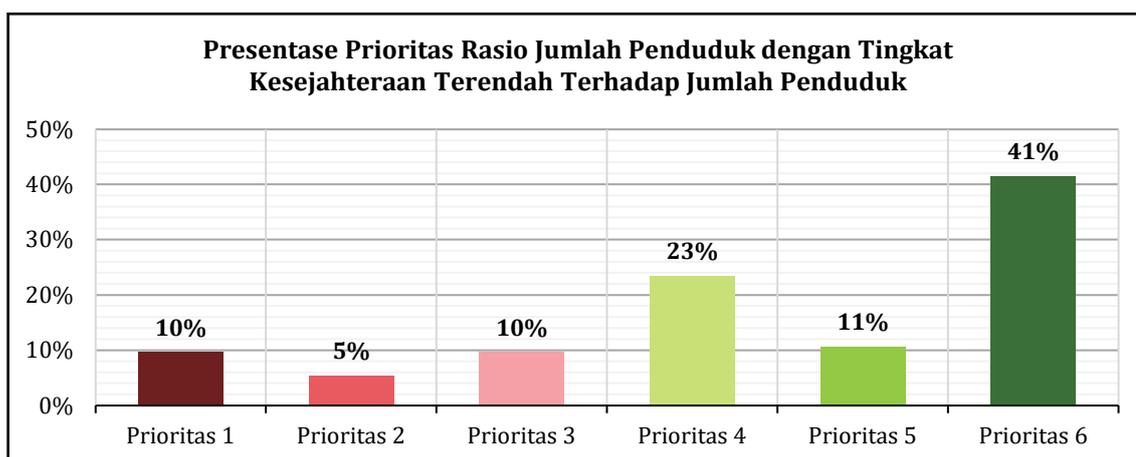
Dari hasil analisis indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu kecamatan Kumai dikarenakan seluruh desa/kelurahan di kecamatan tersebut termasuk kedalam prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1-3) dengan total terbanyak 12 desa dibandingkan dengan kecamatan lain. Pada tabel 3.2.

Berdasarkan hasil analisis data yang digunakan untuk rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, rasio tertinggi (kondisi rasio terburuk) adalah 0,6767 di Desa Sungai Cabang Kecamatan Kumai. Sedangkan rasio terendah (rasio paling baik) adalah 0,0110 di Desa Sagu Suka Mulya Kecamatan Kotawaringin Lama.

Pada tingkat desa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2023, terdapat 9 desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 10% (Prioritas 1). Sebanyak 5 desa (5%) masuk prioritas 2, dan 9 desa (10%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 23 desa tersebut. Disajikan pada tabel 3.3 dan gambar 3.1.

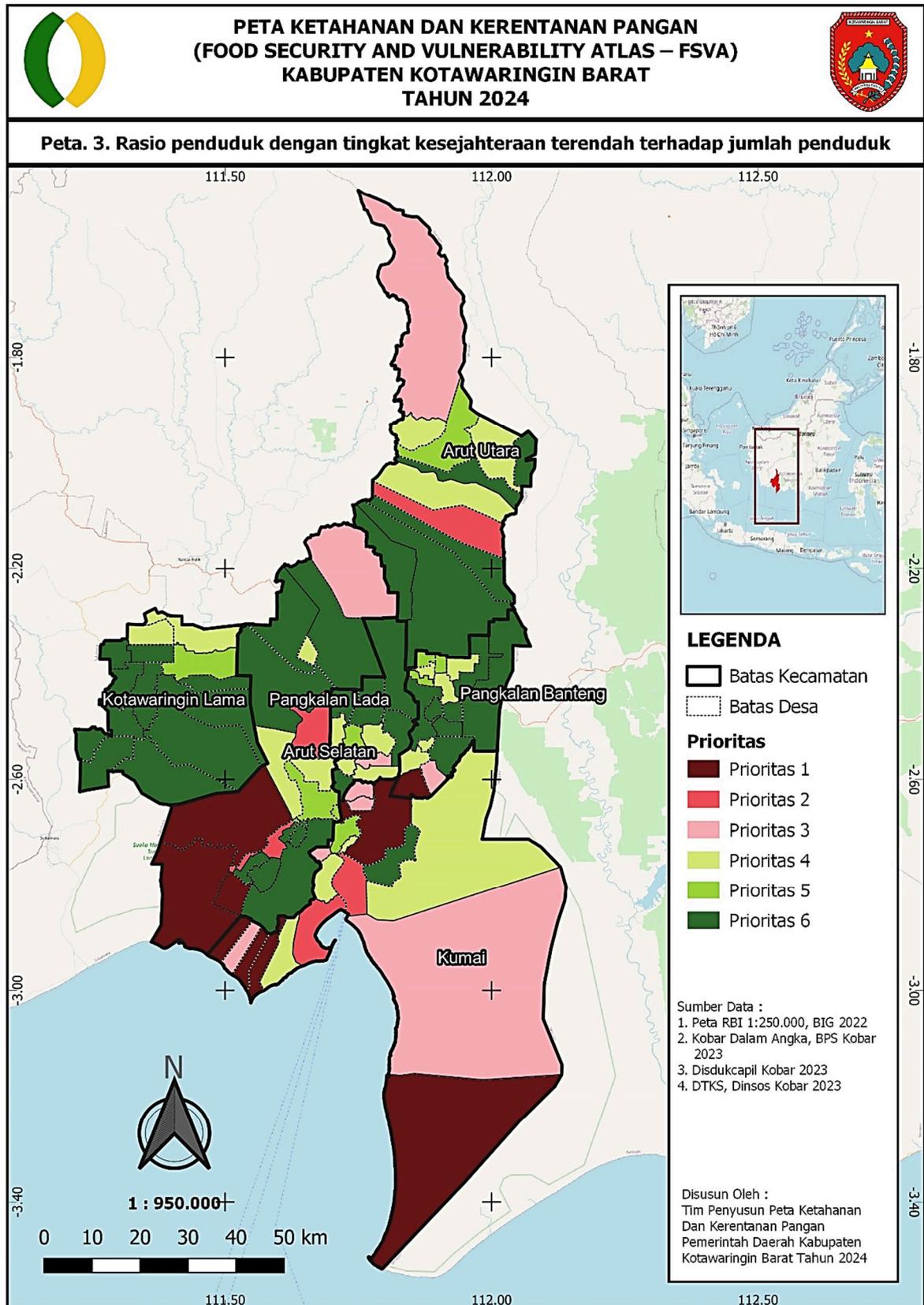
Tabel 3.3. Sebaran desa pada rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio Pddk Sejahtera	Jumlah Desa
1	$\geq 0,4043$	9
2	$0,3255 < 0,4043$	5
3	$0,2752 < 0,3255$	9
4	$0,2041 < 0,2752$	22
5	$0,1649 < 0,2041$	10
6	$< 0,1649$	39



Gambar 3.1. Persentase skala prioritas pada rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa

Gambar 3.1. Peta Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat



### 3.2. AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

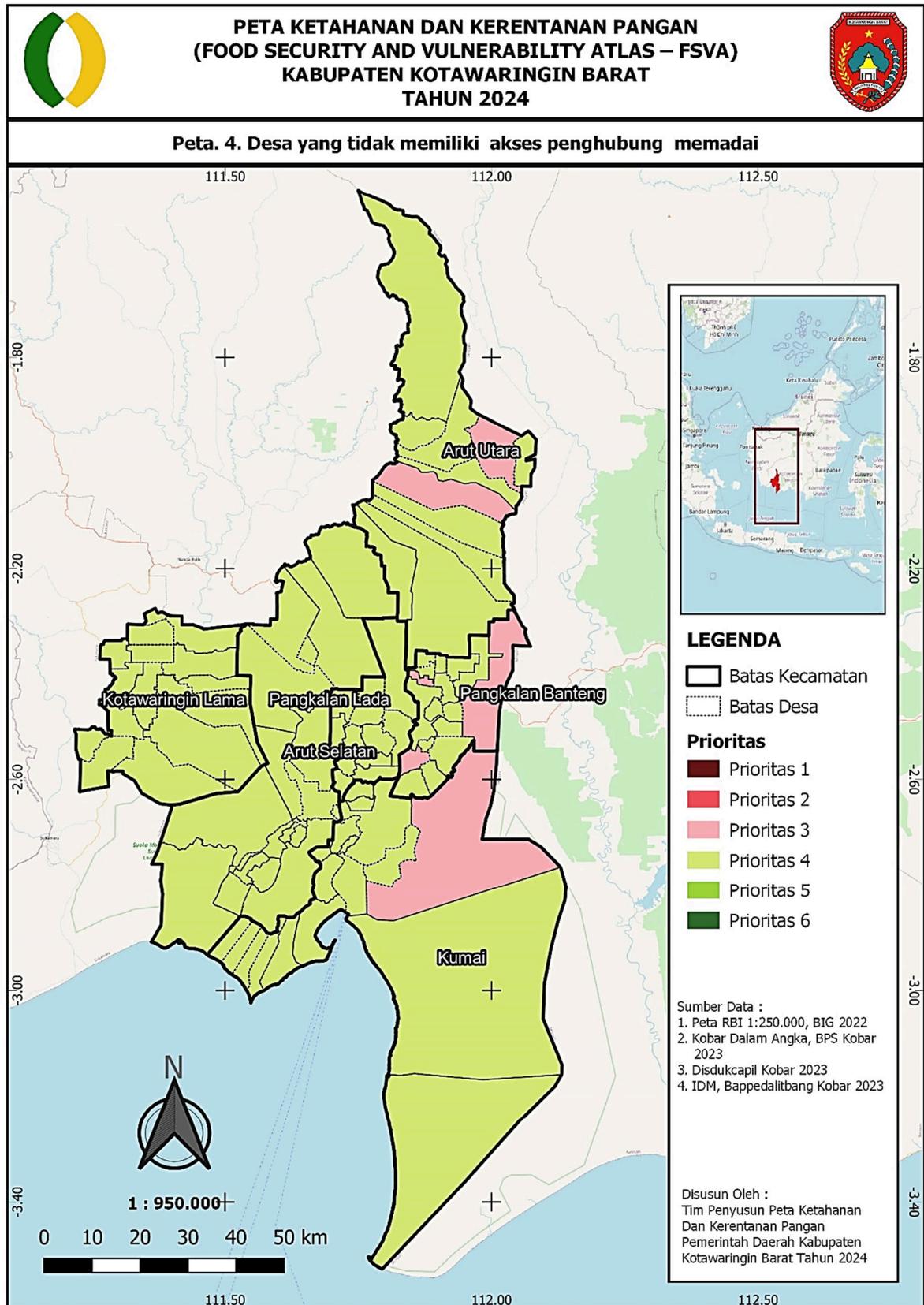
Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendesa 2023, Bappedalitbang, di Kabupaten Kotawaringin Barat, hampir semua desa memiliki akses penghubung sepanjang tahun disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Sebaran desa/kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Kecamatan/Desa	Jumlah Desa	Nilai Kategori/Kriteria
1	-	0	(4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun
2	-	0	(3) dapat dilalui selama musim kemarau
3	Arut Utara (Kerabu & Sambu)	2	(2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.)
	Kumai (Sungai Sekonyer)	1	
	Pangkalan Banteng (Mulya Jadi, Amin Jaya, Sungai Bengkuang)	3	
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
4	Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Arut Utara	88	(1) dapat dilalui sepanjang tahun
<b>Total</b>		<b>94</b>	

Gambar 3.2. Peta Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Kabupaten Kotawaringin Barat



Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Kotawaringin Barat akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, contohnya di wilayah Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.

### 3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

#### **Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan**

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 - 2026 diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur kabupaten melalui pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian pada sektor unggulan.
  - a. Berkolaborasi dengan penduduk setempat untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan infrastruktur ;
  - b. Sinkronisasi proses pelayanan perizinan dengan perangkat atau instansi lain dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat ;
  - c. Optimalisasi pendanaan instansi vertikal dan CSR sektor swasta dalam upaya pengentasan kawasan kumuh dan penyediaan infrastruktur ;
  - d. Peninjauan kembali terhadap masterplan pengembangan infrastruktur daerah untuk mengakomodir IKN baru ;
  - e. Pemanfaatan GIS dalam pengelolaan tata ruang dan infrastruktur
2. Menciptakan stabilitas sosial melalui pemberdayaan untuk menekan Tingkat pengangguran dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk menekan angka pengangguran maka pemberdayaan untuk menciptakan peluang menciptakan lapangan kerja sektor non formal. Sehingga arah kebijakan untuk menekan angka pengangguran adalah :
  - a. Menciptakan wirausahawan muda untuk mengurangi ketergantungan lapangan kerja sektor formal ;
  - b. Meningkatkan skala usaha masyarakat ;
  - c. Optimalisasi sektor UMKM, Pertanian dan industri olahan dalam menciptakan peluang usaha;
  - d. Menyesuaikan kesiapan dan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar.

Adapun untuk menekan PMKS serta menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban di daerah, Pemerintah Kotawaringin Barat menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan sosial untuk menekan angka PMKS ;
- b. Meningkatkan pemberdayaan terhadap PMKS ;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM untuk penanganan PMKS ;

- d. Optimaliasi peran masyarakat dalam penanganan PMKS ;
- e. Keberpihakan pembangunan paMeningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan melibatkan semua golongan ;
- f. Optimalisasi peran Masyarakat khususnya keluarga dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman ;
- g. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan tanpa memandang gender ;
- h. Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorismeda kelompok difable.

## BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi:

- (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan
- (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh.

Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut:

- (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan
- (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

### 4.1. AKSES AIR BERSIH

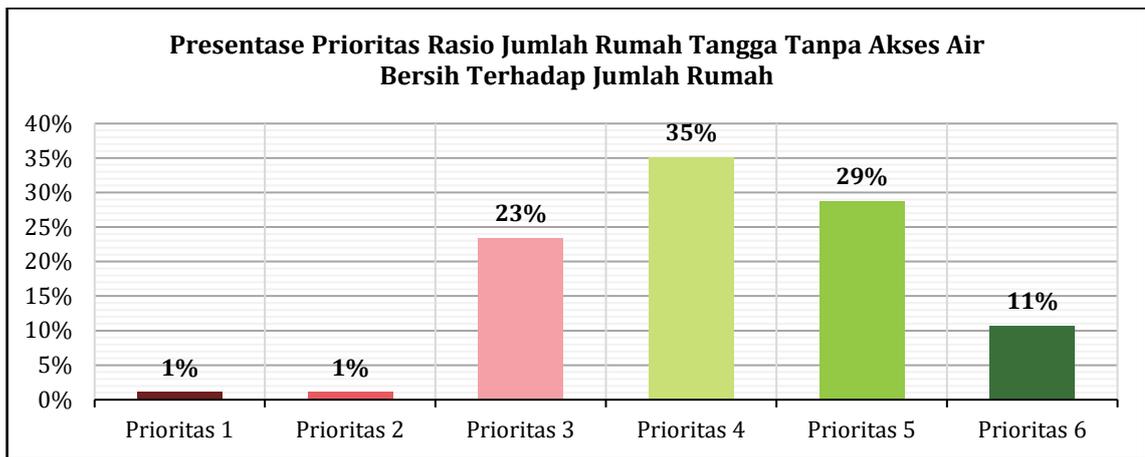
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak<sup>4</sup>. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin barat mengkonsumsi air yang bersumber dari air sungai, sumur tanah, sumur bor dan air PDAM. Berdasarkan data dari Perumda Tirta Arut (PDAM) Kotawaringin Barat sebanyak 93% rumah tangga yang sudah menggunakan air yang bersumber dari PDAM, dan sisanya 7% rumah tangga belum terlayani berdasarkan target total.

Tabel 4.1. Sebaran jumlah desa indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio Air Bersih	Jumlah Desa
1	$\geq 0,0781$	1
2	$0,0500 < 0,0781$	1
3	$0,0194 < 0,0500$	22
4	$0,0500 < 0,0194$	33
5	$0,0000 < 0,0050$	27
6	$< 0,0000$	10

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416 Tahun 1990



Gambar 4.1. Persentase skala prioritas pada rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga

Dari hasil analisis tabel 4.1 dan gambar 4.1 Dari 94 desa/kelurahan, untuk indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga sebanyak 1 desa/kelurahan (1%) termasuk Prioritas 1, sebanyak 1 desa/kelurahan (1%) masuk prioritas 2, sebanyak 22 desa/kelurahan (23%) masuk Prioritas 3, sebanyak 33 desa/kelurahan (35%) masuk Prioritas 4, sebanyak 27 desa/kelurahan (29%) masuk Prioritas 5, serta sebanyak 10 desa/kelurahan (11%) masuk Prioritas 6.

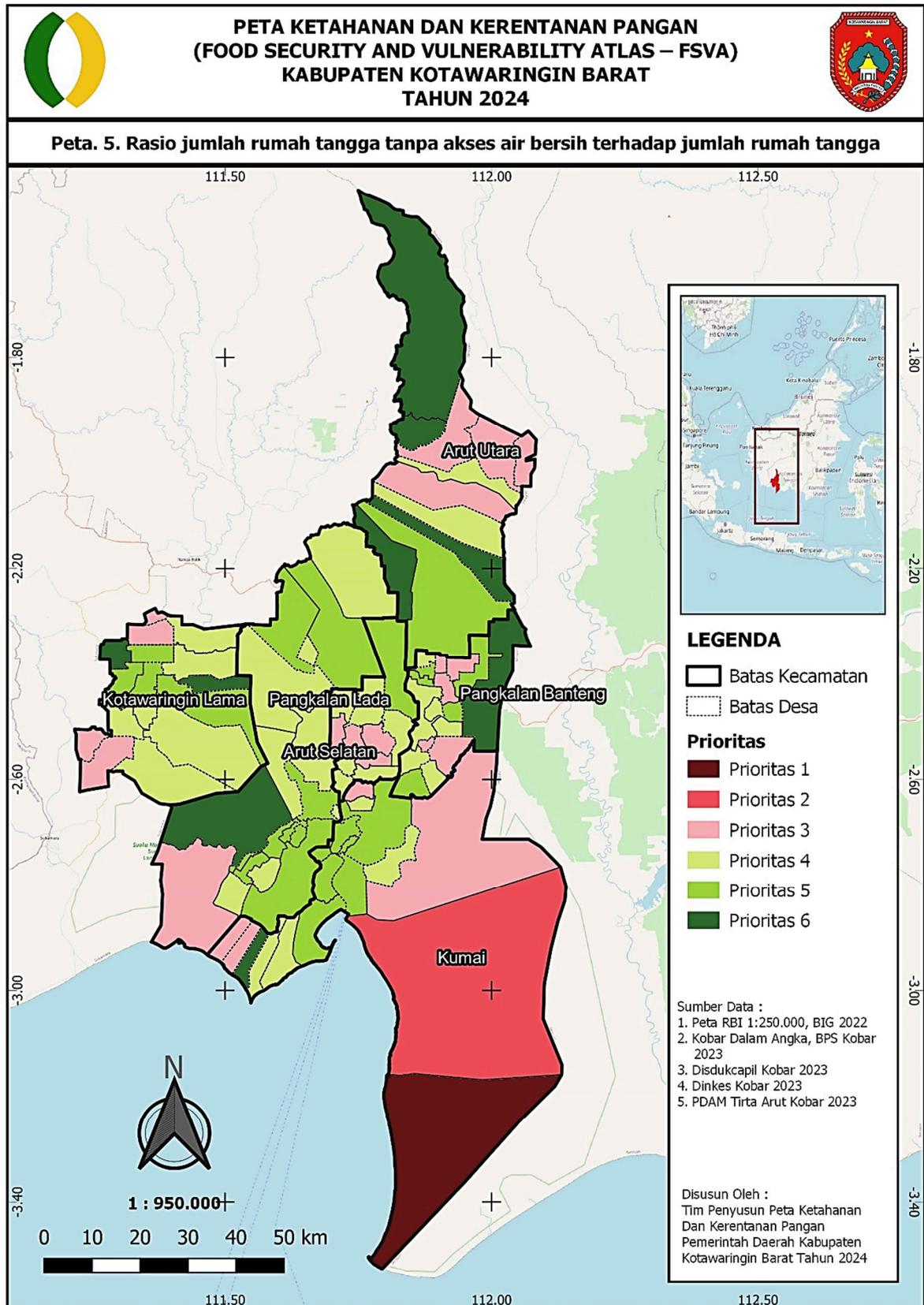
Berdasarkan hasil analisis untuk indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat, rasio terendah (rasio paling baik) adalah 0,0000 di Kecamatan Kumai (Desa Keraya), Arut Selatan (Kelurahan Mendawai Seberang), Kotawaringin Lama (Desa Lalang, Suka Jaya, Sagu Suka Mulya), Arut Utara (Desa Nanga Mua, Sukarami, Riam, Panahan), dan Pangkalan Banteng (Desa Amin Jaya). Sedangkan rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga tertinggi (rasio paling buruk) adalah 0,0964 di Sungai Cabang Kecamatan Kumai.

Dari hasil analisis indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga ada 24 desa tersebar di 6 kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu Kecamatan Kumai (6 desa), Arut selatan (1 desa), Kecamatan Kotawaringin Lama (4 desa), Arut Utara (4 desa), Pangkalan Lada (4 desa) dan Pangkalan Banteng (5 desa). Hal tersebut dikarenakan seluruh desa di 6 wilayah kecamatan tersebut termasuk kedalam prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1-3). Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga per kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas					
		1	2	3	4	5	6
1	Kumai	1	1	4	4	7	1
2	Arut Selatan	0	0	1	9	9	1
3	Kotawaringin Lama	0	0	4	6	4	3
4	Arut Utara	0	0	4	2	1	4
5	Pangkalan Lada	0	0	4	6	1	0
6	Pangkalan Banteng	0	0	5	6	5	1
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>10</b>

Gambar 4.2. Peta Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Barat



## 4.2. RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari:

- (1) Dokter umum/spesialis;
- (2) Dokter gigi;
- (3) Bidan; dan
- (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker).

Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

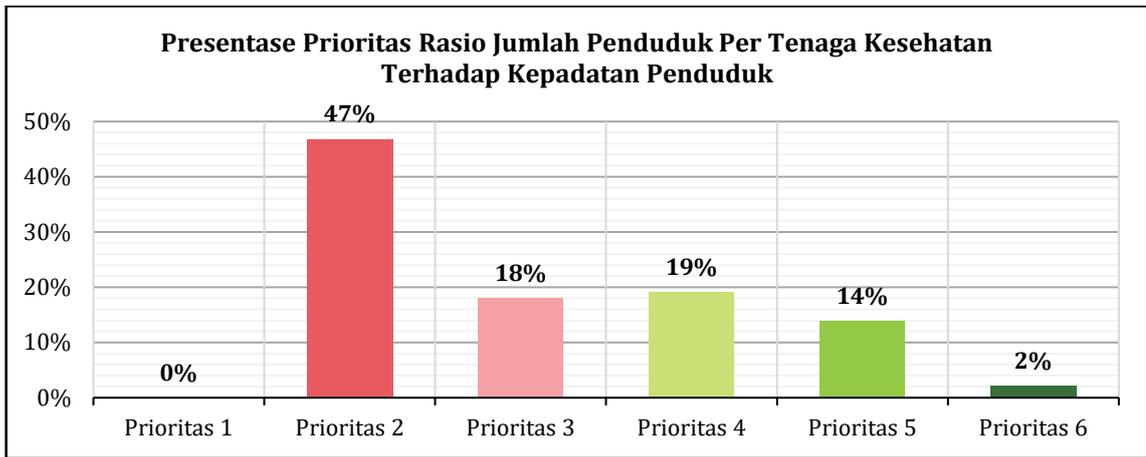
Dalam melakukan analisis indikator rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk digunakan data di tingkat desa/kelurahan sebagai berikut :

- a. Data jumlah penduduk yang bersumber dari Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 (DISDUKCAPIL Kabupaten Kotawaringin Barat).
- b. Data jumlah tenaga kesehatan yang bersumber dari Data Aplikasi Renbut Nakes dan Aplikasi SI-SDMK 2023 (Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat).
- c. Data luas wilayah desa (Ha) yang bersumber dari PERDA Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2037 (BAPPEDALITABANG Kabupaten Kotawaringin Barat).

Sebaran jumlah desa berdasarkan rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada table 4.3. Sedangkan, persentase rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk disajikan pada gambar 4.3.

Tabel 4.3. Sebaran jumlah desa pada rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio Tenaga Kesehatan	Jumlah Desa
1	$\geq 209,0000$	0
2	$39,0000 < 209,0000$	44
3	$15,8800 < 39,0000$	17
4	$6,5900 < 15,8800$	18
5	$3,1000 < 6,5900$	13
6	$< 3,1000$	2



Gambar 4.3. Persentase skala prioritas pada rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

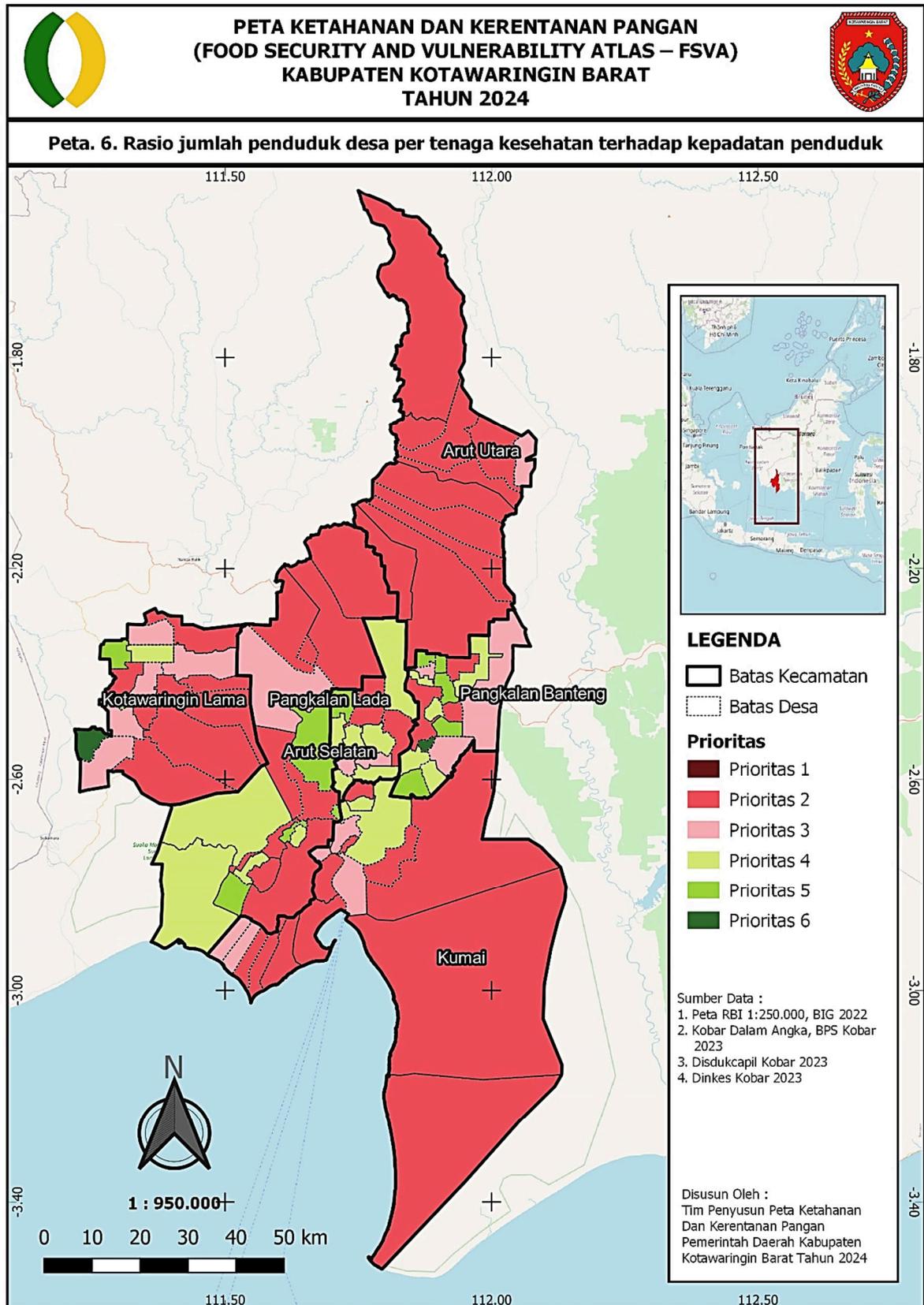
Dari 94 desa/kelurahan, pada FSVA 2024 tidak ada yang termasuk Prioritas 1, sebanyak 44 desa/kelurahan (47%) masuk prioritas 2, sebanyak 17 desa/kelurahan (17%) masuk Prioritas 3, sebanyak 18 desa/kelurahan (19%) masuk Prioritas 4, sebanyak 13 desa/kelurahan (14%) masuk Prioritas 5, dan sebanyak 2 desa/kelurahan (2%) masuk Prioritas 6.

Berdasarkan hasil analisis untuk indikator rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat, rasio terendah (rasio paling baik) adalah 1,5000 di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kotawaringin Lama, sedangkan rasio tertinggi (rasio paling buruk) adalah 100,0000 di 30 Desa tersebar di 6 Kecamatan. Rekapitulasi sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk per kecamatan disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Sebaran jumlah desa/kelurahan indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk per kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas					
		1	2	3	4	5	6
1	Kumai	0	11	5	2	0	0
2	Arut Selatan	0	10	1	4	5	0
3	Kotawaringin Lama	0	8	5	1	2	1
4	Arut Utara	0	10	1	0	0	0
5	Pangkalan Lada	0	2	2	6	1	0
6	Pangkalan Banteng	0	3	3	5	5	1
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>2</b>

Gambar 4.4. Peta Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat



### 4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

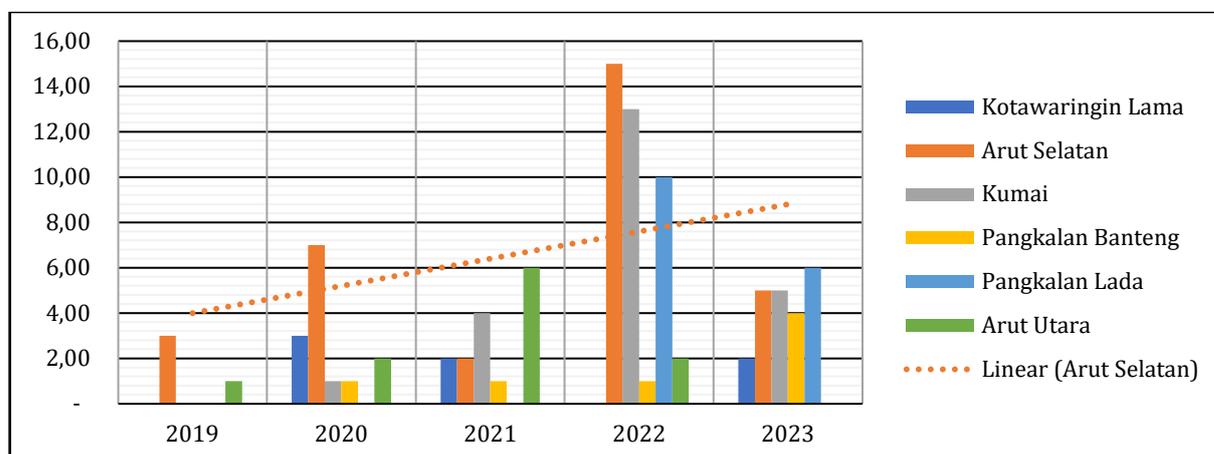
Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Berdasarkan data Program KIA / Puskesmas tahun 2023, jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019-2023 sebanyak 96 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Arut Selatan (32 balita) dan terendah ditemukan di Kecamatan Kotawaringin Lama (7 balita) dan Pangkalan Banteng (7 balita). Rekapitulasi penderita gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 4.5. dan gambar 4.5.

Tabel 4.5. Rekapitulasi penderita gizi buruk tahun 2019-2023 perkecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penderita Gizi Buruk					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kotawaringin Lama	-	3,00	2,00	-	2,00	7,00
2	Arut Selatan	3,00	7,00	2,00	15,00	5,00	32,00
3	Kumai	-	1,00	4,00	13,00	5,00	23,00
4	Pangkalan Banteng	-	1,00	1,00	1,00	4,00	7,00
5	Pangkalan Lada	-	-	-	10,00	6,00	16,00
6	Arut Utara	1,00	2,00	6,00	2,00	-	11,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	<b>41,00</b>	<b>22,00</b>	<b>96,00</b>

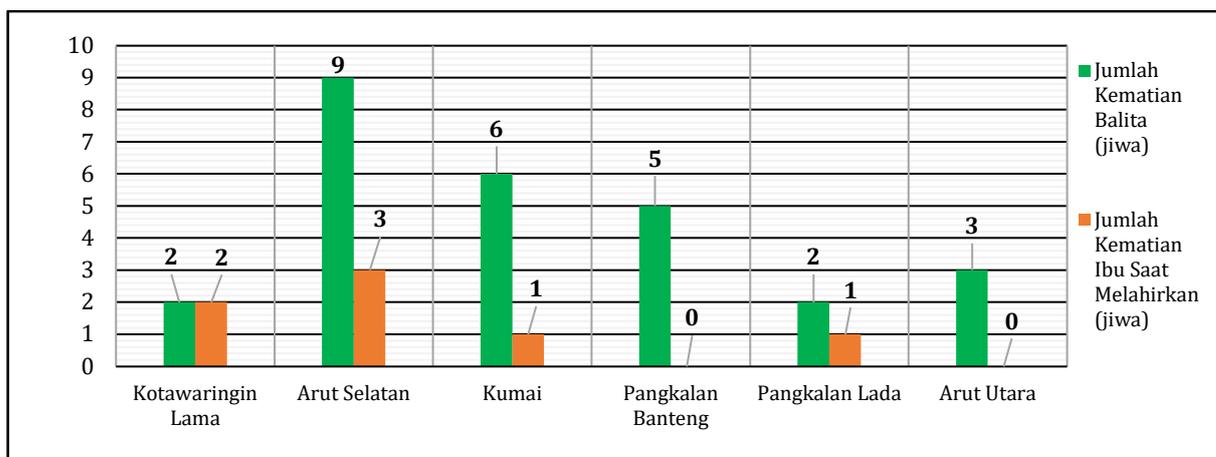


Gambar 4.5. Penderita gizi buruk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019-2023

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 27 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Kotawaringin Barat 7 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Arut selatan (9 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Pangkalan Lada (2 jiwa) dan Kotawaringin Lama (2 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Arut Selatan (3 jiwa) dan terendah di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Arut Utara (0 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan gambar 4.6.

Tabel 4.6. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita (jiwa)	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan (jiwa)	Total
1	2	4	5	6
1	Kotawaringin Lama	2,00	2,00	4,00
2	Arut Selatan	9,00	3,00	12,00
3	Kumai	6,00	1,00	7,00
4	Pangkalan Banteng	5,00	-	5,00
5	Pangkalan Lada	2,00	1,00	3,00
6	Arut Utara	3,00	-	3,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27,00</b>	<b>7,00</b>	<b>34,00</b>



Gambar 4.6. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan tahun 2023

#### 4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

##### **Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan**

Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 program prioritas untuk memperbaiki dan meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Keluarga di Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sebagai berikut :

- Program Pemenuhan Gizi dan Kesehatan Keluarga
- Program Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
- Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Program Penanganan Stunting

Berdasar data survei status gizi Indonesia, masih terdapat kasus stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kasus stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan setelah dilakukannya program intervensi dan pengukuran serentak. Jumlah anak yang mengalami stunting bertambah dari 202 menjadi 404 kasus.

Peningkatan terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Banteng dengan jumlah 121 kasus, Kecamatan Kumai menempati urutan kedua dengan 103 kasus. Di Kecamatan Pangkalan Banteng, desa-desa yang mencatatkan jumlah kasus stunting tertinggi adalah Desa Sungai Hijau, Marga Mulya, dan Kebun Agung. Desa-desa ini memerlukan perhatian khusus dan intervensi lebih lanjut untuk menurunkan angka stunting. Sedangkan di Kecamatan Kumai, kasus stunting paling banyak ditemukan di Desa Kapitan dan Batu Belaman. Desa-desa ini juga menjadi fokus utama dalam program pencegahan stunting yang akan datang, dengan harapan dapat menurunkan angka kasus stunting di wilayah tersebut.

Selain itu, di Kecamatan Arut Selatan, Desa Runtu menjadi salah satu desa yang memiliki jumlah kasus stunting yang cukup tinggi. Peningkatan jumlah kasus stunting ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah gizi buruk di Kotawaringin Barat. Diperlukan kerjasama yang lebih intensif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang baik dan tumbuh kembang yang optimal.

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

## 1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk :

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

## 2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
  - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
  - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
  - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.

- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
  - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
  - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
- 3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.**

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

## BAB 5

### KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Gambar 5.2) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

#### 5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

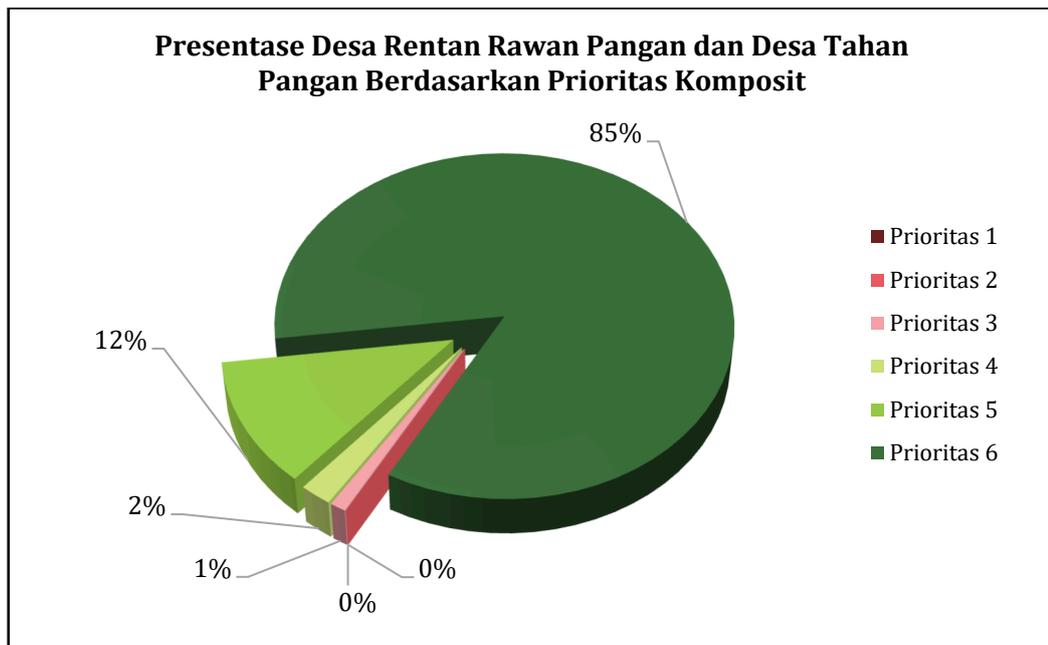
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis secara komposit, dari 94 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada desa yang masuk ke dalam prioritas 1 dan 2, sebanyak 1 desa/kelurahan (1%) termasuk dalam prioritas rentan rawan pangan (prioritas 3) sedangkan 93 desa/kelurahan (99%) lainnya termasuk dalam prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6).

Jika dirinci berdasarkan skala prioritas, tidak ada desa/kelurahan yang termasuk Prioritas 1 dan 2. sebanyak 1 desa/kelurahan (1%) yang termasuk Prioritas 3, sebanyak 2 desa/kelurahan (2%) yang termasuk Prioritas 4, sebanyak 11 desa/kelurahan (12%) yang termasuk Prioritas 5, dan sebanyak 80 desa/kelurahan (85%) yang termasuk dalam Prioritas 6. Sebaran jumlah desa/kelurahan secara komposit berdasarkan skala prioritas disajikan pada tabel 5.1. dan gambar 5.1.

Tabel 5.1. Sebaran jumlah desa/kelurahan secara komposit berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range Indeks Komposit	Jumlah Desa
1	$\leq 43,64$	0
2	$> 43,64 - 50,96$	0
3	$> 50,96 - 54,74$	1
4	$> 54,74 - 59,48$	2
5	$> 59,48 - 62,70$	11
6	$> 62,70$	80



Gambar 5.1. Presentase jumlah desa/kelurahan tahan dan rentan rawan pangan secara komposit.

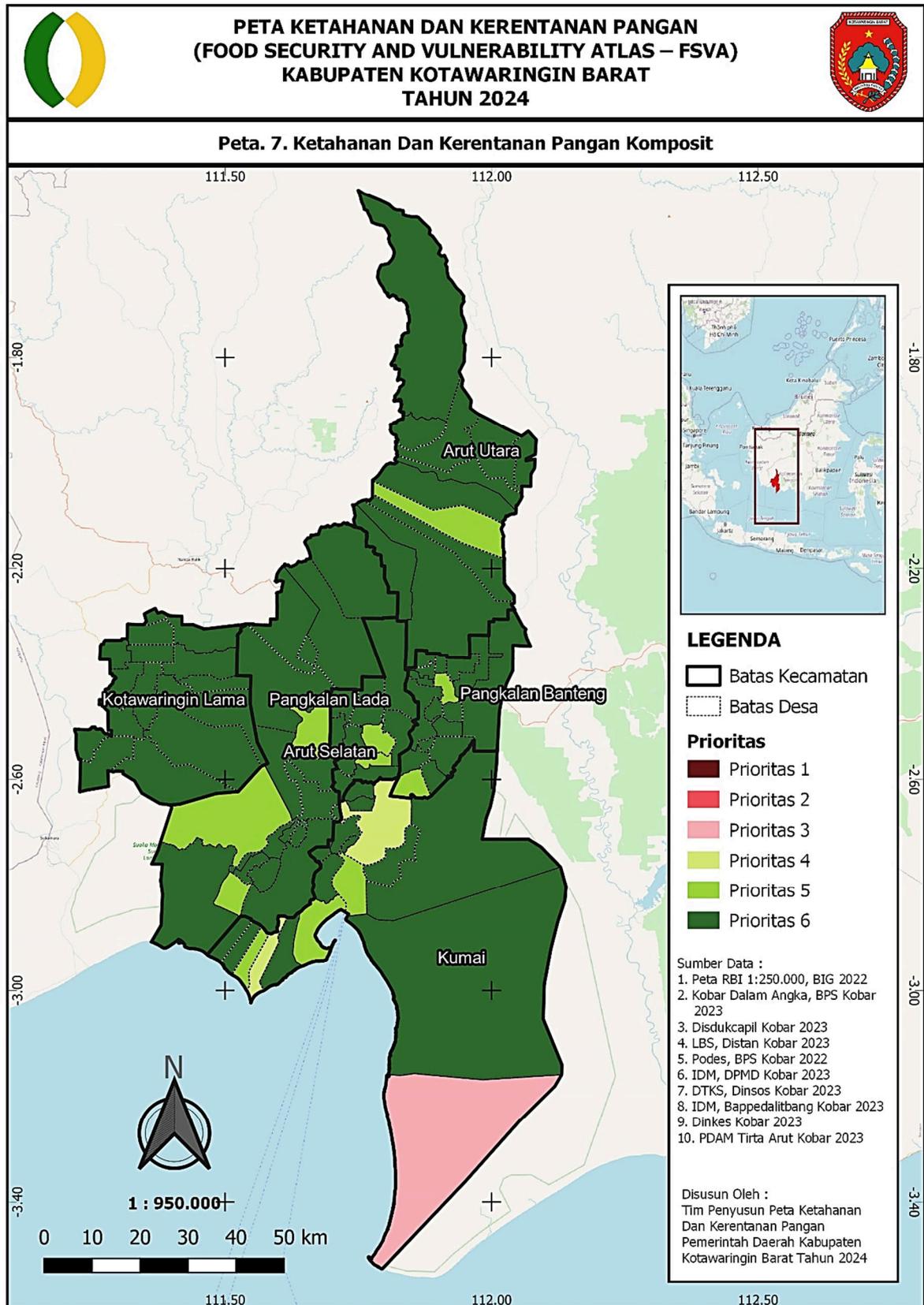
Tabel.5.2. Sebaran jumlah desa/kelurahan berdasarkan analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan per kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas					
		1	2	3	4	5	6
1	Kumai	0	0	1	2	3	12
2	Arut Selatan	0	0	0	0	3	17
3	Kotawaringin Lama	0	0	0	0	0	17
4	Arut Utara	0	0	0	0	1	10
5	Pangkalan Lada	0	0	0	0	2	9
6	Pangkalan Banteng	0	0	0	0	2	15
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>80</b>

Pada tabel 5.2 dapat diuraikan Kelurahan/desa rentan terhadap kerawanan pangan berdasarkan skala prioritas :

1. **Prioritas 1** dan **Prioritas 2** tidak ada.
2. **Prioritas 3** terdapat di wilayah Kecamatan Kumai, yaitu Desa Sungai Cabang.
3. **Prioritas 4** terdapat di wilayah Kecamatan Kumai, yaitu : Kelurahan Kumai Hulu dan Desa Teluk Bogam.
4. **Prioritas 5** terdapat di wilayah
  - a) Kecamatan Kumai, yaitu : Kelurahan Kumai Hilir, Desa Keraya, dan Desa Kubu,
  - b) Kecamatan Arut Selatan, yaitu : Kelurahan Mendawai Seberang, Desa Medang Sari, dan Desa Tanjung Terantang,
  - c) Kecamatan Arut Utara, yaitu : Desa Gandis,
  - d) Kecamatan Pangkalan Lada, yaitu : Desa Lada Mandala Jaya, dan Desa Sungai Rangit Jaya.
  - e) Kecamatan Pangkalan Banteng, yaitu : Desa Sungai Hijau dan Desa Sungai Pulau.
5. **Prioritas 6** tersebar di wilayah 6 Kecamatan.

Gambar 5.2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit Kabupaten Kotawaringin Barat



## 5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Dari 94 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat 93 (99%) kelurahan/desa yang tahan pangan (prioritas 4-6) dan sejumlah 1 desa (1%) dalam kondisi rentan pangan (prioritas 1-3). Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh:

- 1) Lahan pertanian yang masih kurang produktif dan tidak optimal,
- 2) Tingginya jumlah penduduk yang tidak sejahtera,
- 3) Banyaknya rumah tangga tanpa akses air bersih,
- 4) Kurangnya tenaga kesehatan, dan
- 5) Jumlah sarana penyedia pangan yang kurang mencukupi.

Perbedaan prioritas pada daerah rawan pangan di sebabkan adanya perbedaan rasio hasil analisis indikator penyebab kerawanan pangan.

Tabel 5.3. Faktor yang mempengaruhi di daerah rentan pangan berdasarkan bobot.

PRIORITAS KOMPOSIT	Prioritas 1
1. Bobot Rasio Lahan	3
2. Bobot Rasio Penduduk Tidak Sejahtera	3
3. Bobot Rasio Tanpa Air Bersih	3
4. Bobot Rasio Penduduk per Tenaga kesehatan per Density	2
5. Bobot Rasio Sarana	1
6. Bobot Akses Jalan	0

Berdasarkan hasil analisis, maka **aspek pemanfaatan pangan** yaitu **indikator rasio jumlah tenaga kesehatan per kepadatan penduduk** dan **rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih** memiliki sumbangan terbesar dalam menyebabkan terjadinya kerentanan pangan. Rata-rata skor Indikator Individu, Indeks Ketersediaan, Indeks Akses, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Komposit di **Prioritas Rentan (1 - 3)** dan **Prioritas tahan pangan (prioritas 4 - 6)** adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4. Rata-rata Skor Indikator Individu, Indeks Ketersediaan, Indeks Akses, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Komposit di Prioritas Rentan (1 - 3)

Jenis Indikator	Nilai Rata-Rata
1. Rata2 Skor Rasio Lahan	0,00
2. Rata2 Skor Rasio Sarana	9,20
3. Rata2 Skor Rasio Tidak Sejahtera	20,12
4. Rata2 Skor Akses Jalan	100,00
<b>5. Rata2 Skor Rasio Tanpa Air Bersih *)</b>	<b>77,93</b>
<b>6. Rata2 Skor Rasio Tenaga Kesehatan *)</b>	<b>100,00</b>
Rata2 INDEKS KETERSEDIAAN	4,60
Rata2 INDEKS AKSES	60,06
<b>Rata2 INDEKS PEMANFAATAN *)</b>	<b>88,97</b>
Rata2 INDEKS KOMPOSIT	51,21

Keterangan :

\*) Rata-rata skor sumbangan terbesar dalam menyebabkan terjadinya kerentanan pangan

Tabel 5.5. Rata-rata Skor Indikator Individu, Indeks Ketersediaan, Indeks Akses, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Komposit di Prioritas Tahan (4 - 6)

Jenis Indikator	Nilai Rata-Rata
1. Rata2 Skor Rasio Lahan	4,1496
2. Rata2 Skor Rasio Sarana	7,66
3. Rata2 Skor Rasio Tidak Sejahtera	84,80
4. Rata2 Skor Akses Jalan	100,00
5. Rata2 Skor Rasio Tanpa Air Bersih	97,38
6. Rata2 Skor Rasio Tenaga Kesehatan	100,00
Rata2 INDEKS KETERSEDIAAN	5,90
Rata2 INDEKS AKSES	92,40
Rata2 INDEKS PEMANFAATAN	98,69
Rata2 INDEKS KOMPOSIT	<b>65,67</b>

## BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

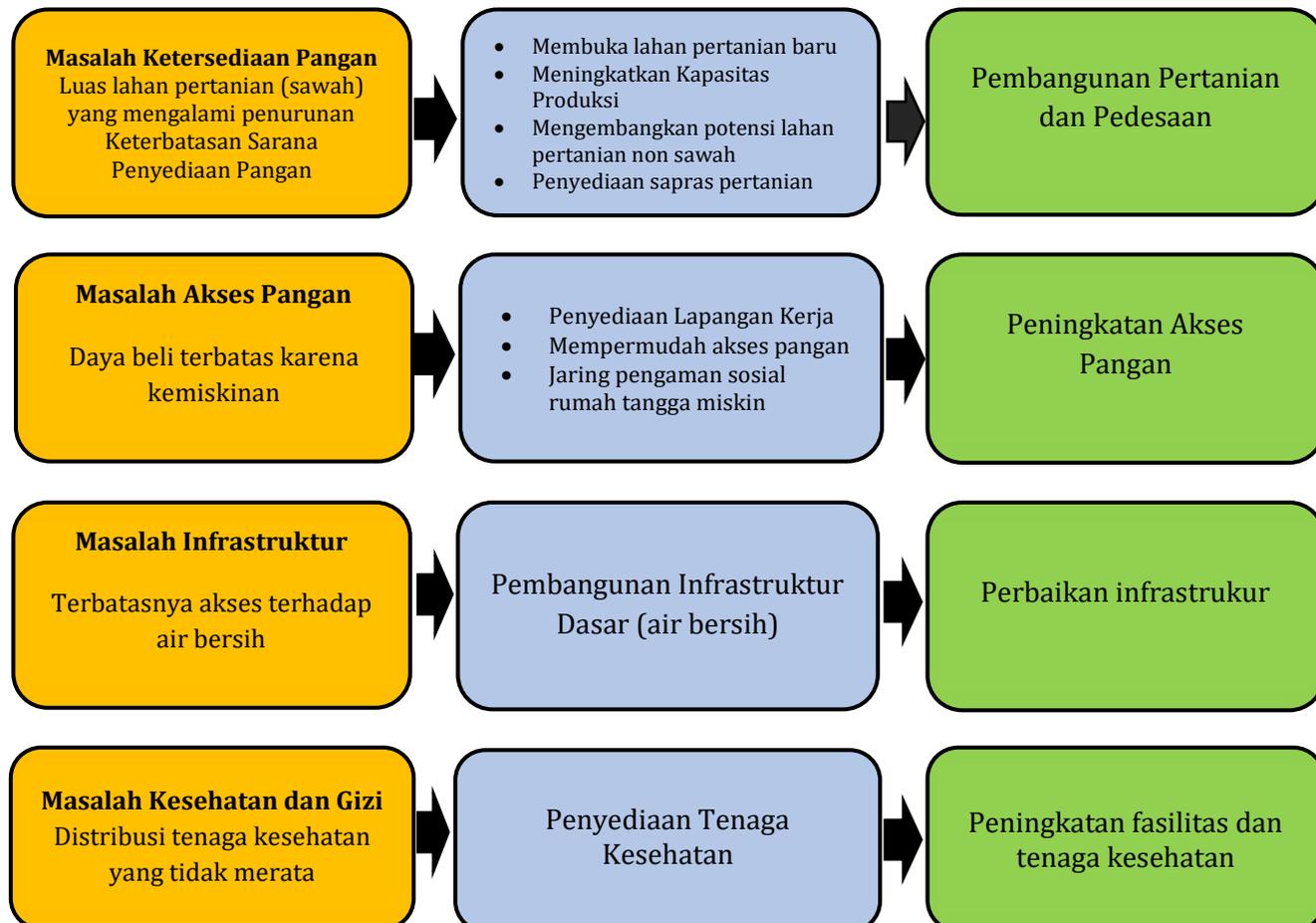
Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- Desa-desanya prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Kumai
- Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- Desa-desanya di pesisir pantai yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- Desa-desanya pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1. Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:

- a. Pengembangan lahan sawah, optimalisasi penggunaan lahan, mengimbangi alih fungsi lahan, pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi, peningkatan produktivitas, pengolahan/perbaikan tanah, Memperkuat pengawasan peningkatan produktivitas pertanian, Penguatan kelembagaan petani, dan Pengurangan dampak iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi, penyuluhan dan pembangunan fasilitas air bersih.
- d. Penyediaan tenaga Kesehatan, fasilitas tenaga Kesehatan, Peningkatan kualitas layanan Kesehatan, pemenuhan gizi dan Kesehatan keluarga, dan penanganan stunting.
- e. Pengembangan dan pembangunan sarana perekonomian berupa fasilitas pasar dan pertokoan di tingkat desa/kelurahan, serta penyediaan fasilitas pasokan bahan pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2020. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2020*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2021. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2021*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2022. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2022*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2023. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2023*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2024. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2024*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, 2023. *Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No.164.4/KG.01.01/K6/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023*. Jakarta : Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.
- Committee On World Food Security (CFS), 2012. *36th sessions of 15-22 October 2012 Final Report*. Rome-Italia.
- Menteri Kesehatan, 1990. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang : Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Muhamad Dika Yudhistira, 2013. *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Studi Kasus Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara)*. Bogor. Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- PEMKAB Kotawaringin Barat, 2022. *Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Kotawaringin Barat*. Pangkalan Bun : PEMKAB Kab. Kotawaringin Barat.
- PEMKAB Kotawaringin Barat, 2022. *PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 63 TAHUN 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022*. Pangkalan Bun : PEMKAB Kab. Kotawaringin Barat.
- PEMKAB Kotawaringin Barat, 2024. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Kotawaringin Barat*. Pangkalan Bun : PEMKAB Kab. Kotawaringin Barat.
- UNSCN (UN System Standing Committee on Nutrition), 2013. *Meeting Of The Minds And Nutrition Impact Of Food Systems, 25-28 March 2013*. New York. Funded by the Flemish International Cooperation Agency (FICA).

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator dan Prioritas Komposit.

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. Prioritas Rasio Lahan	2. Prioritas Rasio Sarana	3. Prioritas Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Prioritas Akses Jalan	5. Prioritas Rasio Tanpa Air Bersih	6. Prioritas Rasio Pddk per Tenkes	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
1	Kumai	Kelurahan Candi	1	2	4	4	5	2	64	64	6
2	Kumai	Kelurahan Kumai Hulu	1	2	1	4	5	4	59	93	4
3	Kumai	Kelurahan Kumai Hilir	5	1	2	4	5	3	62	87	5
4	Kumai	Sungai Cabang	1	3	1	4	1	2	51	94	3
5	Kumai	Teluk Pulai	6	4	3	4	2	2	77	1	6
6	Kumai	Sabuai	6	3	1	4	3	3	70	2	6
7	Kumai	Keraya	1	6	1	4	6	2	63	81	5
8	Kumai	Teluk Bogam	1	3	1	4	4	2	59	92	4
9	Kumai	Sungai Bakau	6	3	4	4	4	2	66	47	6
10	Kumai	Kubu	5	3	2	4	5	2	62	88	5
11	Kumai	Sungai Kapitan	4	3	4	4	5	2	65	55	6
12	Kumai	Batu Belaman	1	3	3	4	5	3	64	71	6
13	Kumai	Sungai Tendang	1	2	5	4	5	3	65	53	6
14	Kumai	Sungai Sekonyer	6	3	4	3	3	2	68	22	6
15	Kumai	Sungai Bedaun	1	2	6	4	4	2	67	38	6
16	Kumai	Bumi Harjo	4	3	3	4	3	2	63	77	6
17	Kumai	Pangkalan Satu	4	3	3	4	4	4	63	78	6
18	Kumai	Sebuai Timur	1	6	3	4	3	3	64	69	6
19	Arut Selatan	Kelurahan Mendawai Seberang	1	2	1	4	6	4	60	90	5
20	Arut Selatan	Kelurahan Mendawai	4	6	2	4	5	2	64	68	6
21	Arut Selatan	Kelurahan Madurejo	4	4	6	4	5	4	69	9	6
22	Arut Selatan	Kelurahan Sidorejo	1	2	6	4	5	5	67	31	6
23	Arut Selatan	Kelurahan Raja	1	6	5	4	5	2	68	10	6
24	Arut Selatan	Kelurahan Raja Seberang	5	2	4	4	4	2	64	65	6
25	Arut Selatan	Kelurahan Baru	4	4	5	4	5	2	66	39	6
26	Arut Selatan	Tanjung Putri	6	3	1	4	3	4	68	11	6
27	Arut Selatan	Pasir Panjang	4	3	6	4	5	2	67	28	6
28	Arut Selatan	Rangda	4	3	6	4	4	3	68	19	6
29	Arut Selatan	Kenambui	5	2	4	4	4	2	65	62	6
30	Arut Selatan	Runtu	1	3	6	4	5	2	68	13	6
31	Arut Selatan	Umpang	1	2	3	4	4	2	63	79	6
32	Arut Selatan	Kumpai Batu Bawah	6	3	6	4	5	4	70	3	6
33	Arut Selatan	Kumpai Batu Atas	6	3	6	4	4	2	69	6	6
34	Arut Selatan	Natai Raya	4	3	5	4	4	5	66	44	6
35	Arut Selatan	Medang Sari	1	4	2	4	4	5	62	83	5
36	Arut Selatan	Natai Baru	1	2	4	4	4	5	63	76	6
37	Arut Selatan	Tanjung Terantang	6	2	1	4	4	5	61	89	5
38	Arut Selatan	Sulung	5	3	6	4	5	2	69	7	6

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. Prioritas Rasio Lahan	2. Prioritas Rasio Sarana	3. Prioritas Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Prioritas Akses Jalan	5. Prioritas Rasio Tanpa Air Bersih	6. Prioritas Rasio Pddk per Tenkes	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
39	Kotawaringin Lama	Kelurahan Kotawaringin Hulu	5	3	6	4	5	2	68	17	6
40	Kotawaringin Lama	Kelurahan Kotawaringin Hilir	4	1	6	4	4	2	67	36	6
41	Kotawaringin Lama	Babual Baboti	6	1	6	4	4	2	66	42	6
42	Kotawaringin Lama	Tempayung	1	1	6	4	3	3	66	45	6
43	Kotawaringin Lama	Sakabulin	1	3	6	4	4	3	68	21	6
44	Kotawaringin Lama	Kinjil	1	3	6	4	4	2	67	26	6
45	Kotawaringin Lama	Dawak	1	3	6	4	5	2	68	20	6
46	Kotawaringin Lama	Riam Durian	1	6	6	4	5	3	70	5	6
47	Kotawaringin Lama	Lalang	6	3	6	4	6	2	70	4	6
48	Kotawaringin Lama	Rungun	5	1	5	4	4	3	65	54	6
49	Kotawaringin Lama	Kondang	1	3	4	4	4	2	64	72	6
50	Kotawaringin Lama	Suka Jaya	1	3	6	4	6	5	67	37	6
51	Kotawaringin Lama	Suka Makmur	1	3	6	4	5	4	68	18	6
52	Kotawaringin Lama	Sumber Mukti	5	3	6	4	3	6	67	29	6
53	Kotawaringin Lama	Palih Baru	5	4	4	4	3	2	66	50	6
54	Kotawaringin Lama	Ipuh Bangun Jaya	1	3	4	4	3	3	64	67	6
55	Kotawaringin Lama	Sagu Suka Mulya	1	1	6	4	6	5	67	32	6
56	Arut Utara	Kelurahan Pangkut	4	1	6	4	5	2	67	35	6
57	Arut Utara	Nanga Mua	5	1	6	4	6	2	68	16	6
58	Arut Utara	Sukarami	6	2	6	4	6	2	68	15	6
59	Arut Utara	Gandis	1	3	2	4	4	2	62	86	5
60	Arut Utara	Kerabu	1	3	4	3	3	2	63	74	6
61	Arut Utara	Sambi	5	2	4	3	3	2	64	63	6
62	Arut Utara	Penyombaan	6	2	6	4	4	2	68	24	6
63	Arut Utara	Pandau	4	4	5	4	3	2	66	48	6
64	Arut Utara	Riam	1	3	4	4	6	2	65	57	6
65	Arut Utara	Panahan	1	2	3	4	6	2	63	80	6
66	Arut Utara	Sungai Dau	1	4	6	4	3	3	67	27	6
67	Pangkalan Lada	Pangkalan Tiga	1	2	6	4	5	4	68	25	6
68	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	1	2	6	4	4	2	66	40	6
69	Pangkalan Lada	Lada Mandala Jaya	1	2	4	4	3	4	62	85	5
70	Pangkalan Lada	Makarti Jaya	5	1	6	4	4	5	67	34	6
71	Pangkalan Lada	Sumber Agung	1	5	4	4	4	3	65	52	6
72	Pangkalan Lada	Purbasari	4	2	6	4	4	4	66	43	6

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. Prioritas Rasio Lahan	2. Prioritas Rasio Sarana	3. Prioritas Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Prioritas Akses Jalan	5. Prioritas Rasio Tanpa Air Bersih	6. Prioritas Rasio Pddk per Tenkes	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
73	Pangkalan Lada	Sungai Rangit Jaya	1	3	3	4	3	3	63	82	5
74	Pangkalan Lada	Pangkalan Dewa	4	2	6	4	4	2	67	30	6
75	Pangkalan Lada	Kadipi Atas	1	3	4	4	3	4	64	73	6
76	Pangkalan Lada	Sungai Melawen	1	4	5	4	3	4	66	49	6
77	Pangkalan Lada	Pangkalan Durin	1	2	4	4	4	4	65	59	6
78	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	5	2	6	4	4	2	67	33	6
79	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	4	1	4	3	4	4	64	70	6
80	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	1	4	6	4	5	2	69	8	6
81	Pangkalan Banteng	Kebun Agung	1	1	5	4	3	5	65	61	6
82	Pangkalan Banteng	Sido Mulyo	1	3	4	4	5	3	65	51	6
83	Pangkalan Banteng	Marga Mulya	5	1	6	4	4	4	66	41	6
84	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	1	3	6	3	6	3	68	12	6
85	Pangkalan Banteng	Arga Mulya	1	1	4	4	3	2	63	75	6
86	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	4	2	6	4	3	3	66	46	6
87	Pangkalan Banteng	Simpang Berambai	1	3	6	4	4	5	68	23	6
88	Pangkalan Banteng	Sungai Hijau	1	1	4	4	3	5	62	84	5
89	Pangkalan Banteng	Sungai Pakit	1	3	6	4	5	4	68	14	6
90	Pangkalan Banteng	Berambai Makmur	6	2	4	4	3	6	65	60	6
91	Pangkalan Banteng	Karang Sari	5	4	3	4	4	4	64	66	6
92	Pangkalan Banteng	Sungai Pulau	1	3	1	4	5	5	60	91	5
93	Pangkalan Banteng	Sungai Bengkuang	1	1	5	3	5	4	65	56	6
94	Pangkalan Banteng	Sungai Kuning	1	1	5	4	4	5	65	58	6

**Keterangan :**

<b>Prioritas 1</b>	: Sangat Rentan
<b>Prioritas 2</b>	: Rentan
<b>Prioritas 3</b>	: Agak Rentan
<b>Prioritas 4</b>	: Agak Tahan
<b>Prioritas 5</b>	: Tahan
<b>Prioritas 6</b>	: Sangat Tahan

Lampiran 2. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Data Rasio Per Indikator.

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. Data Rasio Lahan	2. Data Rasio Sarana	3. Data Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Data Akses Jalan	5. Data Rasio Tanpa Air Bersih	6. Data Rasio Pddk per Tenkes
1	Kumai	Kelurahan Candi	0,0000	0,0367	0,2412	1,0000	0,0042	67,0000
2	Kumai	Kelurahan Kumai Hulu	0,0000	0,0264	0,4641	1,0000	0,0021	15,0000
3	Kumai	Kelurahan Kumai Hilir	0,0144	0,0216	0,3457	1,0000	0,0014	32,0250
4	Kumai	Sungai Cabang	0,0000	0,0500	0,6767	1,0000	0,0964	100,0000
5	Kumai	Teluk Pulai	1,0823	0,0584	0,3070	1,0000	0,0511	100,0000
6	Kumai	Sabuai	0,9381	0,0425	0,5264	1,0000	0,0330	31,0000
7	Kumai	Keraya	0,0000	0,0955	0,4094	1,0000	0,0000	39,0000
8	Kumai	Teluk Bogam	0,0000	0,0530	0,4902	1,0000	0,0069	100,0000
9	Kumai	Sungai Bakau	0,0874	0,0457	0,2205	1,0000	0,0158	100,0000
10	Kumai	Kubu	0,0194	0,0476	0,3858	1,0000	0,0025	40,6667
11	Kumai	Sungai Kapitan	0,0051	0,0387	0,2234	1,0000	0,0024	45,0000
12	Kumai	Batu Belaman	0,0000	0,0489	0,2774	1,0000	0,0018	36,5000
13	Kumai	Sungai Tendang	0,0000	0,0304	0,2018	1,0000	0,0008	26,0000
14	Kumai	Sungai Sekonyer	0,2708	0,0473	0,2068	2,0000	0,0473	100,0000
15	Kumai	Sungai Bedaun	0,0000	0,0361	0,1294	1,0000	0,0090	100,0000
16	Kumai	Bumi Harjo	0,0134	0,0446	0,2837	1,0000	0,0198	100,0000
17	Kumai	Pangkalan Satu	0,0020	0,0392	0,2976	1,0000	0,0071	8,1900
18	Kumai	Sebuai Timur	0,0000	0,0842	0,2930	1,0000	0,0211	35,0000
19	Arut Selatan	Kelurahan Mendawai Seberang	0,0000	0,0242	0,4074	1,0000	0,0000	14,0000
20	Arut Selatan	Kelurahan Mendawai	0,0037	0,0860	0,3302	1,0000	0,0012	100,0000
21	Arut Selatan	Kelurahan Madurejo	0,0000	0,0615	0,0987	1,0000	0,0022	13,0000
22	Arut Selatan	Kelurahan Sidorejo	0,0000	0,0336	0,1180	1,0000	0,0002	4,5000
23	Arut Selatan	Kelurahan Raja	0,0000	0,1210	0,1897	1,0000	0,0014	100,0000
24	Arut Selatan	Kelurahan Raja Seberang	0,0311	0,0325	0,2529	1,0000	0,0050	57,5000
25	Arut Selatan	Kelurahan Baru	0,0074	0,0598	0,1924	1,0000	0,0010	100,0000
26	Arut Selatan	Tanjung Putri	0,5989	0,0528	0,4205	1,0000	0,0264	9,5000
27	Arut Selatan	Pasir Panjang	0,0003	0,0429	0,1261	1,0000	0,0014	81,0000
28	Arut Selatan	Rangda	0,0021	0,0456	0,0673	1,0000	0,0085	25,5000
29	Arut Selatan	Kenambui	0,0629	0,0364	0,2550	1,0000	0,0136	100,0000
30	Arut Selatan	Runtu	0,0000	0,0456	0,0684	1,0000	0,0034	100,0000
31	Arut Selatan	Umpang	0,0000	0,0368	0,2967	1,0000	0,0057	100,0000
32	Arut Selatan	Kumpai Batu Bawah	0,1344	0,0545	0,1111	1,0000	0,0026	9,7250
33	Arut Selatan	Kumpai Batu Atas	0,0814	0,0520	0,1061	1,0000	0,0062	100,0000
34	Arut Selatan	Natai Raya	0,0119	0,0435	0,1752	1,0000	0,0075	3,1000
35	Arut Selatan	Medang Sari	0,0000	0,0574	0,3405	1,0000	0,0123	4,5000
36	Arut Selatan	Natai Baru	0,0000	0,0355	0,2646	1,0000	0,0142	3,6500
37	Arut Selatan	Tanjung Terantang	0,1935	0,0380	0,5170	1,0000	0,0076	6,1250
38	Arut Selatan	Sulung	0,0521	0,0528	0,0896	1,0000	0,0038	100,0000
39	Kotawaringin Lama	Kelurahan Kotawaringin Hulu	0,0251	0,0539	0,1315	1,0000	0,0041	100,0000
40	Kotawaringin Lama	Kelurahan Kotawaringin Hilir	0,0122	0,0198	0,1023	1,0000	0,0069	100,0000
41	Kotawaringin Lama	Babual Baboti	0,0728	0,0181	0,1565	1,0000	0,0181	100,0000
42	Kotawaringin Lama	Tempayung	0,0000	0,0121	0,0779	1,0000	0,0242	26,5000
43	Kotawaringin Lama	Sakabulin	0,0000	0,0426	0,0265	1,0000	0,0071	31,0000
44	Kotawaringin Lama	Kinjil	0,0000	0,0392	0,0790	1,0000	0,0098	43,0000

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. Data Rasio Lahan	2. Data Rasio Sarana	3. Data Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Data Akses Jalan	5. Data Rasio Tanpa Air Bersih	6. Data Rasio Pddk per Tenkes
45	Kotawaringin Lama	Dawak	0,0000	0,0397	0,0732	1,0000	0,0036	41,0000
46	Kotawaringin Lama	Riam Durian	0,0000	0,0980	0,1113	1,0000	0,0013	23,4500
47	Kotawaringin Lama	Lalang	0,2147	0,0459	0,1577	1,0000	0,0000	51,0000
48	Kotawaringin Lama	Rungun	0,0491	0,0129	0,1989	1,0000	0,0065	35,5000
49	Kotawaringin Lama	Kondang	0,0000	0,0469	0,2667	1,0000	0,0078	78,0000
50	Kotawaringin Lama	Suka Jaya	0,0000	0,0469	0,1516	1,0000	0,0000	4,9150
51	Kotawaringin Lama	Suka Makmur	0,0000	0,0408	0,0868	1,0000	0,0029	13,1800
52	Kotawaringin Lama	Sumber Mukti	0,0190	0,0480	0,0792	1,0000	0,0295	1,5000
53	Kotawaringin Lama	Palih Baru	0,0388	0,0612	0,2080	1,0000	0,0262	100,0000
54	Kotawaringin Lama	Ipuh Bangun Jaya	0,0000	0,0429	0,2264	1,0000	0,0229	21,0500
55	Kotawaringin Lama	Sagu Suka Mulya	0,0000	0,0216	0,0110	1,0000	0,0000	3,5100
56	Arut Utara	Kelurahan Pangkut	0,0096	0,0184	0,0790	1,0000	0,0041	100,0000
57	Arut Utara	Nanga Mua	0,0493	0,0188	0,0112	1,0000	0,0000	100,0000
58	Arut Utara	Sukarami	0,1063	0,0261	0,1447	1,0000	0,0000	93,0000
59	Arut Utara	Gandis	0,0000	0,0447	0,3548	1,0000	0,0056	100,0000
60	Arut Utara	Kerabu	0,0000	0,0442	0,2543	2,0000	0,0276	90,5000
61	Arut Utara	Sambi	0,0178	0,0310	0,2052	2,0000	0,0276	100,0000
62	Arut Utara	Penyombaan	0,0986	0,0329	0,1407	1,0000	0,0132	100,0000
63	Arut Utara	Pandau	0,0026	0,0584	0,1667	1,0000	0,0292	100,0000
64	Arut Utara	Riam	0,0000	0,0505	0,2485	1,0000	0,0000	72,5000
65	Arut Utara	Panahan	0,0000	0,0376	0,3102	1,0000	0,0000	100,0000
66	Arut Utara	Sungai Dau	0,0000	0,0595	0,1102	1,0000	0,0238	30,0000
67	Pangkalan Lada	Pangkalan Tiga	0,0000	0,0337	0,1035	1,0000	0,0008	11,2500
68	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	0,0000	0,0297	0,1449	1,0000	0,0059	100,0000
69	Pangkalan Lada	Lada Mandala Jaya	0,0000	0,0277	0,2680	1,0000	0,0360	15,8650
70	Pangkalan Lada	Makarti Jaya	0,0186	0,0187	0,0785	1,0000	0,0075	6,5000
71	Pangkalan Lada	Sumber Agung	0,0000	0,0706	0,2302	1,0000	0,0147	32,1000
72	Pangkalan Lada	Purbasari	0,0126	0,0329	0,1603	1,0000	0,0072	10,5000
73	Pangkalan Lada	Sungai Rangit Jaya	0,0000	0,0496	0,3033	1,0000	0,0242	15,8950
74	Pangkalan Lada	Pangkalan Dewa	0,0008	0,0377	0,0917	1,0000	0,0138	100,0000
75	Pangkalan Lada	Kadipi Atas	0,0000	0,0532	0,2505	1,0000	0,0307	7,9050
76	Pangkalan Lada	Sungai Melawen	0,0000	0,0646	0,1908	1,0000	0,0242	10,4000
77	Pangkalan Lada	Pangkalan Durin	0,0000	0,0380	0,2104	1,0000	0,0130	10,5000
78	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	0,0185	0,0291	0,0974	1,0000	0,0138	100,0000
79	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	0,0011	0,0154	0,2157	2,0000	0,0077	7,0000
80	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	0,0000	0,0663	0,0906	1,0000	0,0020	100,0000

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. Data Rasio Lahan	2. Data Rasio Sarana	3. Data Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Data Akses Jalan	5. Data Rasio Tanpa Air Bersih	6. Data Rasio Pddk per Tenkes
81	Pangkalan Banteng	Kebun Agung	0,0000	0,0222	0,1793	1,0000	0,0204	4,7500
82	Pangkalan Banteng	Sido Mulyo	0,0000	0,0514	0,2174	1,0000	0,0015	22,5000
83	Pangkalan Banteng	Marga Mulya	0,0235	0,0172	0,1290	1,0000	0,0157	11,0000
84	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	0,0000	0,0443	0,0855	2,0000	0,0000	22,5000
85	Pangkalan Banteng	Arga Mulya	0,0000	0,0211	0,2319	1,0000	0,0211	75,0000
86	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	0,0095	0,0264	0,1235	1,0000	0,0281	32,5000
87	Pangkalan Banteng	Simpang Berambai	0,0000	0,0490	0,0889	1,0000	0,0149	3,5000
88	Pangkalan Banteng	Sungai Hijau	0,0000	0,0124	0,2456	1,0000	0,0310	5,0000
89	Pangkalan Banteng	Sungai Pakit	0,0000	0,0463	0,0453	1,0000	0,0048	7,0000
90	Pangkalan Banteng	Berambai Makmur	0,0984	0,0302	0,2166	1,0000	0,0402	2,5000
91	Pangkalan Banteng	Karang Sari	0,0558	0,0556	0,2889	1,0000	0,0128	7,0000
92	Pangkalan Banteng	Sungai Pulau	0,0000	0,0437	0,4441	1,0000	0,0049	6,0000
93	Pangkalan Banteng	Sungai Bengkuang	0,0000	0,0096	0,1782	2,0000	0,0027	14,0000
94	Pangkalan Banteng	Sungai Kuning	0,0000	0,0212	0,1869	1,0000	0,0116	4,2500

**Keterangan :**

- Hasil analisis indikator rasio **paling buruk** ditunjukkan dengan **warna merah**

Lampiran 3. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Skor Individu Per Indikator.

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. Skor Rasio Lahan	2. Skor Rasio Sarana	3. Skor Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Skor Akses Jalan	5. Skor Rasio Tanpa Air Bersih	6. Skor Rasio Pddk per Tenkes
1	Kumai	Kelurahan Candi	0,00	6,53	80,57	100,00	99,03	100,00
2	Kumai	Kelurahan Kumai Hulu	0,00	4,44	49,62	100,00	99,53	100,00
3	Kumai	Kelurahan Kumai Hilir	1,22	3,46	66,06	100,00	99,67	100,00
4	Kumai	Sungai Cabang	0,00	9,20	20,12	100,00	77,93	100,00
5	Kumai	Teluk Pulai	91,45	10,90	71,43	100,00	88,31	100,00
6	Kumai	Sabuai	79,27	7,68	40,98	100,00	92,44	100,00
7	Kumai	Keraya	0,00	18,38	57,22	100,00	100,00	100,00
8	Kumai	Teluk Bogam	0,00	9,81	46,00	100,00	98,42	100,00
9	Kumai	Sungai Bakau	7,38	8,33	83,44	100,00	96,38	100,00
10	Kumai	Kubu	1,64	8,71	60,49	100,00	99,44	100,00
11	Kumai	Sungai Kapitan	0,43	6,92	83,03	100,00	99,45	100,00
12	Kumai	Batu Belaman	0,00	8,98	75,55	100,00	99,58	100,00
13	Kumai	Sungai Tendang	0,00	5,24	86,03	100,00	99,82	100,00
14	Kumai	Sungai Sekonyer	22,88	8,66	85,34	100,00	89,17	100,00
15	Kumai	Sungai Bedaun	0,00	6,41	96,08	100,00	97,93	100,00
16	Kumai	Bumi Harjo	1,14	8,11	74,67	100,00	95,48	100,00
17	Kumai	Pangkalan Satu	0,17	7,02	72,74	100,00	98,37	100,00
18	Kumai	Sebuai Timur	0,00	16,10	73,38	100,00	95,18	100,00
19	Arut Selatan	Kelurahan Mendawai Seberang	0,00	4,00	57,50	100,00	100,00	100,00
20	Arut Selatan	Kelurahan Mendawai	0,31	16,46	68,22	100,00	99,72	100,00
21	Arut Selatan	Kelurahan Madurejo	0,00	11,53	100,00	100,00	99,50	100,00
22	Arut Selatan	Kelurahan Sidorejo	0,00	5,89	97,66	100,00	99,96	100,00
23	Arut Selatan	Kelurahan Raja	0,00	23,53	87,71	100,00	99,69	100,00
24	Arut Selatan	Kelurahan Raja Seberang	2,63	5,67	78,94	100,00	98,86	100,00
25	Arut Selatan	Kelurahan Baru	0,63	11,18	87,34	100,00	99,77	100,00
26	Arut Selatan	Tanjung Putri	50,60	9,77	55,68	100,00	93,96	100,00
27	Arut Selatan	Pasir Panjang	0,02	7,77	96,53	100,00	99,69	100,00
28	Arut Selatan	Rangda	0,17	8,31	100,00	100,00	98,04	100,00
29	Arut Selatan	Kenambui	5,32	6,45	78,65	100,00	96,88	100,00
30	Arut Selatan	Runtu	0,00	8,32	100,00	100,00	99,23	100,00
31	Arut Selatan	Umpang	0,00	6,54	72,87	100,00	98,70	100,00
32	Arut Selatan	Kumpai Batu Bawah	11,35	10,10	98,62	100,00	99,41	100,00
33	Arut Selatan	Kumpai Batu Atas	6,88	9,61	99,32	100,00	98,58	100,00
34	Arut Selatan	Natai Raya	1,01	7,89	89,72	100,00	98,28	100,00
35	Arut Selatan	Medang Sari	0,00	10,69	66,78	100,00	97,19	100,00
36	Arut Selatan	Natai Baru	0,00	6,28	77,31	100,00	96,75	100,00
37	Arut Selatan	Tanjung Terantang	16,35	6,78	42,28	100,00	98,26	100,00
38	Arut Selatan	Sulung	4,40	9,77	100,00	100,00	99,14	100,00
39	Kotawaringin Lama	Kelurahan Kotawaringin Hulu	2,12	10,00	95,80	100,00	99,05	100,00
40	Kotawaringin Lama	Kelurahan Kotawaringin Hilir	1,03	3,10	99,85	100,00	98,43	100,00
41	Kotawaringin Lama	Babual Baboti	6,15	2,75	92,33	100,00	95,87	100,00
42	Kotawaringin Lama	Tempayung	0,00	1,56	100,00	100,00	94,45	100,00
43	Kotawaringin Lama	Sakabulin	0,00	7,70	100,00	100,00	98,38	100,00

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. Skor Rasio Lahan	2. Skor Rasio Sarana	3. Skor Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Skor Akses Jalan	5. Skor Rasio Tanpa Air Bersih	6. Skor Rasio Pddk per Tenkes
44	Kotawaringin Lama	Kinjil	0,00	7,03	100,00	100,00	97,76	100,00
45	Kotawaringin Lama	Dawak	0,00	7,13	100,00	100,00	99,17	100,00
46	Kotawaringin Lama	Riam Durian	0,00	18,88	98,60	100,00	99,71	100,00
47	Kotawaringin Lama	Lalang	18,14	8,37	92,15	100,00	100,00	100,00
48	Kotawaringin Lama	Rungun	4,15	1,72	86,44	100,00	98,52	100,00
49	Kotawaringin Lama	Kondang	0,00	8,57	77,03	100,00	98,21	100,00
50	Kotawaringin Lama	Suka Jaya	0,00	8,57	93,00	100,00	100,00	100,00
51	Kotawaringin Lama	Suka Makmur	0,00	7,35	100,00	100,00	99,33	100,00
52	Kotawaringin Lama	Sumber Mukti	1,61	8,79	100,00	100,00	93,24	100,00
53	Kotawaringin Lama	Palih Baru	3,28	11,47	85,18	100,00	94,00	100,00
54	Kotawaringin Lama	Ipuh Bangun Jaya	0,00	7,76	82,62	100,00	94,77	100,00
55	Kotawaringin Lama	Sagu Suka Mulya	0,00	3,46	100,00	100,00	100,00	100,00
56	Arut Utara	Kelurahan Pangkut	0,81	2,83	100,00	100,00	99,06	100,00
57	Arut Utara	Nanga Mua	4,16	2,90	100,00	100,00	100,00	100,00
58	Arut Utara	Sukarami	8,98	4,39	93,96	100,00	100,00	100,00
59	Arut Utara	Gandis	0,00	8,13	64,79	100,00	98,72	100,00
60	Arut Utara	Kerabu	0,00	8,03	78,75	100,00	93,68	100,00
61	Arut Utara	Sambi	1,51	5,37	85,56	100,00	93,69	100,00
62	Arut Utara	Penyombaan	8,33	5,75	94,52	100,00	96,99	100,00
63	Arut Utara	Pandau	0,22	10,90	90,91	100,00	93,32	100,00
64	Arut Utara	Riam	0,00	9,30	79,55	100,00	100,00	100,00
65	Arut Utara	Panahan	0,00	6,71	70,99	100,00	100,00	100,00
66	Arut Utara	Sungai Dau	0,00	11,12	98,74	100,00	94,55	100,00
67	Pangkalan Lada	Pangkalan Tiga	0,00	5,91	99,68	100,00	99,81	100,00
68	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	0,00	5,11	93,92	100,00	98,64	100,00
69	Pangkalan Lada	Lada Mandala Jaya	0,00	4,71	76,85	100,00	91,75	100,00
70	Pangkalan Lada	Makarti Jaya	1,57	2,88	100,00	100,00	98,29	100,00
71	Pangkalan Lada	Sumber Agung	0,00	13,36	82,09	100,00	96,63	100,00
72	Pangkalan Lada	Purbasari	1,06	5,76	91,79	100,00	98,36	100,00
73	Pangkalan Lada	Sungai Rangit Jaya	0,00	9,12	71,95	100,00	94,47	100,00
74	Pangkalan Lada	Pangkalan Dewa	0,07	6,72	100,00	100,00	96,84	100,00
75	Pangkalan Lada	Kadipi Atas	0,00	9,84	79,27	100,00	92,98	100,00
76	Pangkalan Lada	Sungai Melawen	0,00	12,16	87,56	100,00	94,45	100,00
77	Pangkalan Lada	Pangkalan Durin	0,00	6,77	84,85	100,00	97,01	100,00
78	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	1,56	4,99	100,00	100,00	96,84	100,00
79	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	0,09	2,23	84,10	100,00	98,24	100,00
80	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	0,00	12,48	100,00	100,00	99,54	100,00
81	Pangkalan Banteng	Kebun Agung	0,00	3,60	89,16	100,00	95,34	100,00
82	Pangkalan Banteng	Sido Mulyo	0,00	9,48	83,87	100,00	99,65	100,00

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. Skor Rasio Lahan	2. Skor Rasio Sarana	3. Skor Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Skor Akses Jalan	5. Skor Rasio Tanpa Air Bersih	6. Skor Rasio Pddk per Tenkes
83	Pangkalan Banteng	Marga Mulya	1,98	2,59	96,14	100,00	96,41	100,00
84	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	0,00	8,05	100,00	100,00	100,00	100,00
85	Pangkalan Banteng	Arga Mulya	0,00	3,37	81,86	100,00	95,17	100,00
86	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	0,80	4,44	96,89	100,00	93,58	100,00
87	Pangkalan Banteng	Simpang Berambai	0,00	9,01	100,00	100,00	96,60	100,00
88	Pangkalan Banteng	Sungai Hijau	0,00	1,62	79,96	100,00	92,90	100,00
89	Pangkalan Banteng	Sungai Pakit	0,00	8,46	100,00	100,00	98,91	100,00
90	Pangkalan Banteng	Berambai Makmur	8,32	5,20	83,98	100,00	90,80	100,00
91	Pangkalan Banteng	Karang Sari	4,72	10,32	73,95	100,00	97,07	100,00
92	Pangkalan Banteng	Sungai Pulau	0,00	7,93	52,41	100,00	98,89	100,00
93	Pangkalan Banteng	Sungai Bengkuang	0,00	1,05	89,31	100,00	99,37	100,00
94	Pangkalan Banteng	Sungai Kuning	0,00	3,39	88,10	100,00	97,35	100,00

**Keterangan :**

- Skor Rentan Rawan Pangan (prioritas 1, 2 dan 3) ditunjukkan dengan **warna merah**

Lampiran 4. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Angka indeks Per Aspek dan Komposit

No.	Nama Kec	Nama Desa	INDEKS KETERSEDIAAN PANGAN	INDEKS AKSES TERHADAP PANGAN	INDEKS PEMANFAATAN PANGAN	INDEKS KOMPOSIT
1	Kumai	Kelurahan Candi	3,26	90,28	99,51	64,35
2	Kumai	Kelurahan Kumai Hulu	2,22	74,81	99,76	58,93
3	Kumai	Kelurahan Kumai Hilir	2,34	83,03	99,84	61,74
4	Kumai	Sungai Cabang	4,60	60,06	88,97	51,21
5	Kumai	Teluk Pulai	51,17	85,71	94,15	77,01
6	Kumai	Sabuai	43,47	70,49	96,22	70,06
7	Kumai	Keraya	9,19	78,61	100,00	62,60
8	Kumai	Teluk Bogam	4,90	73,00	99,21	59,04
9	Kumai	Sungai Bakau	7,86	91,72	98,19	65,92
10	Kumai	Kubu	5,17	80,25	99,72	61,71
11	Kumai	Sungai Kapitan	3,67	91,52	99,73	64,97
12	Kumai	Batu Belaman	4,49	87,77	99,79	64,02
13	Kumai	Sungai Tendang	2,62	93,02	99,91	65,18
14	Kumai	Sungai Sekonyer	15,77	92,67	94,58	67,67
15	Kumai	Sungai Bedaun	3,20	98,04	98,97	66,74
16	Kumai	Bumi Harjo	4,62	87,33	97,74	63,23
17	Kumai	Pangkalan Satu	3,60	86,37	99,18	63,05
18	Kumai	Sebui Timur	8,05	86,69	97,59	64,11
19	Arut Selatan	Kelurahan Mendawai Seberang	2,00	78,75	100,00	60,25
20	Arut Selatan	Kelurahan Mendawai	8,38	84,11	99,86	64,12
21	Arut Selatan	Kelurahan Madurejo	5,77	100,00	99,75	68,51
22	Arut Selatan	Kelurahan Sidorejo	2,95	98,83	99,98	67,25
23	Arut Selatan	Kelurahan Raja	11,76	93,85	99,84	68,49
24	Arut Selatan	Kelurahan Raja Seberang	4,15	89,47	99,43	64,35
25	Arut Selatan	Kelurahan Baru	5,90	93,67	99,89	66,49
26	Arut Selatan	Tanjung Putri	30,19	77,84	96,98	68,34
27	Arut Selatan	Pasir Panjang	3,90	98,27	99,84	67,34
28	Arut Selatan	Rangda	4,24	100,00	99,02	67,75
29	Arut Selatan	Kenambui	5,88	89,32	98,44	64,55
30	Arut Selatan	Runtu	4,16	100,00	99,61	67,92
31	Arut Selatan	Umpang	3,27	86,43	99,35	63,02
32	Arut Selatan	Kumpai Batu Bawah	10,73	99,31	99,70	69,91
33	Arut Selatan	Kumpai Batu Atas	8,24	99,66	99,29	69,06
34	Arut Selatan	Natai Raya	4,45	94,86	99,14	66,15
35	Arut Selatan	Medang Sari	5,35	83,39	98,59	62,44
36	Arut Selatan	Natai Baru	3,14	88,66	98,37	63,39
37	Arut Selatan	Tanjung Terantang	11,56	71,14	99,13	60,61
38	Arut Selatan	Sulung	7,09	100,00	99,57	68,89
39	Kotawaringin Lama	Kelurahan Kotawaringin Hulu	6,06	97,90	99,53	67,83
40	Kotawaringin Lama	Kelurahan Kotawaringin Hilir	2,07	99,92	99,21	67,07
41	Kotawaringin Lama	Babual Baboti	4,45	96,16	97,93	66,18
42	Kotawaringin Lama	Tempayung	0,78	100,00	97,23	66,00
43	Kotawaringin Lama	Sakabulin	3,85	100,00	99,19	67,68
44	Kotawaringin Lama	Kinjil	3,51	100,00	98,88	67,46

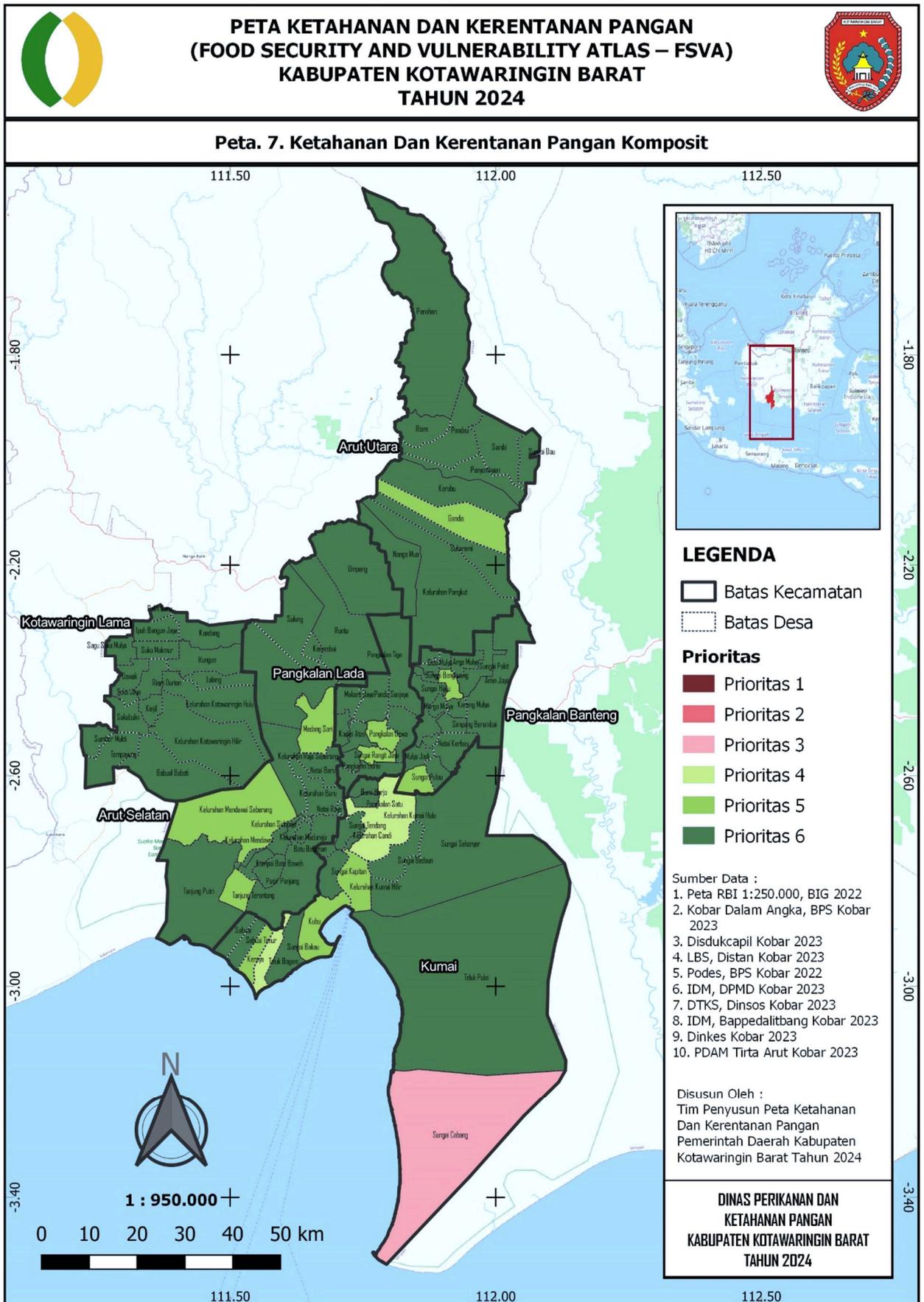
No.	Nama Kec	Nama Desa	INDEKS KETERSEDIAAN PANGAN	INDEKS AKSES TERHADAP PANGAN	INDEKS PEMANFAATAN PANGAN	INDEKS KOMPOSIT
45	Kotawaringin Lama	Dawak	3,56	100,00	99,59	67,72
46	Kotawaringin Lama	Riam Durian	9,44	99,30	99,85	69,53
47	Kotawaringin Lama	Lalang	13,26	96,07	100,00	69,78
48	Kotawaringin Lama	Rungun	2,94	93,22	99,26	65,14
49	Kotawaringin Lama	Kondang	4,29	88,52	99,11	63,97
50	Kotawaringin Lama	Suka Jaya	4,29	96,50	100,00	66,93
51	Kotawaringin Lama	Suka Makmur	3,67	100,00	99,67	67,78
52	Kotawaringin Lama	Sumber Mukti	5,20	100,00	96,62	67,27
53	Kotawaringin Lama	Palih Baru	7,37	92,59	97,00	65,65
54	Kotawaringin Lama	Ipuh Bangun Jaya	3,88	91,31	97,38	64,19
55	Kotawaringin Lama	Sagu Suka Mulya	1,73	100,00	100,00	67,24
56	Arut Utara	Kelurahan Pangkut	1,82	100,00	99,53	67,12
57	Arut Utara	Nanga Mua	3,53	100,00	100,00	67,84
58	Arut Utara	Sukarami	6,69	96,98	100,00	67,89
59	Arut Utara	Gandis	4,07	82,40	99,36	61,94
60	Arut Utara	Kerabu	4,02	89,38	96,84	63,41
61	Arut Utara	Sambi	3,44	92,78	96,84	64,35
62	Arut Utara	Penyombaan	7,04	97,26	98,49	67,60
63	Arut Utara	Pandau	5,56	95,45	96,66	65,89
64	Arut Utara	Riam	4,65	89,78	100,00	64,81
65	Arut Utara	Panahan	3,35	85,49	100,00	62,95
66	Arut Utara	Sungai Dau	5,56	99,37	97,28	67,40
67	Pangkalan Lada	Pangkalan Tiga	2,95	99,84	99,90	67,57
68	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	2,56	96,96	99,32	66,28
69	Pangkalan Lada	Lada Mandala Jaya	2,35	88,43	95,88	62,22
70	Pangkalan Lada	Makarti Jaya	2,23	100,00	99,15	67,12
71	Pangkalan Lada	Sumber Agung	6,68	91,04	98,31	65,35
72	Pangkalan Lada	Purbasari	3,41	95,89	99,18	66,16
73	Pangkalan Lada	Sungai Rangit Jaya	4,56	85,97	97,23	62,59
74	Pangkalan Lada	Pangkalan Dewa	3,40	100,00	98,42	67,27
75	Pangkalan Lada	Kadipi Atas	4,92	89,64	96,49	63,68
76	Pangkalan Lada	Sungai Melawen	6,08	93,78	97,23	65,69
77	Pangkalan Lada	Pangkalan Durin	3,39	92,42	98,51	64,77
78	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	3,28	100,00	98,42	67,23
79	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	1,16	92,05	99,12	64,11
80	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	6,24	100,00	99,77	68,67
81	Pangkalan Banteng	Kebun Agung	1,80	94,58	97,67	64,68
82	Pangkalan Banteng	Sido Mulyo	4,74	91,93	99,83	65,50
83	Pangkalan Banteng	Marga Mulya	2,29	98,07	98,21	66,19
84	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	4,03	100,00	100,00	68,01
85	Pangkalan Banteng	Arga Mulya	1,69	90,93	97,58	63,40
86	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	2,62	98,45	96,79	65,95
87	Pangkalan Banteng	Simpang Berambai	4,50	100,00	98,30	67,60
88	Pangkalan Banteng	Sungai Hijau	0,81	89,98	96,45	62,41
89	Pangkalan Banteng	Sungai Pakit	4,23	100,00	99,46	67,90
90	Pangkalan Banteng	Berambai Makmur	6,76	91,99	95,40	64,72
91	Pangkalan Banteng	Karang Sari	7,52	86,98	98,53	64,34
92	Pangkalan Banteng	Sungai Pulau	3,96	76,20	99,44	59,87

No.	Nama Kec	Nama Desa	INDEKS KETERSEDIAAN PANGAN	INDEKS AKSES TERHADAP PANGAN	INDEKS PEMANFAATAN PANGAN	INDEKS KOMPOSIT
93	Pangkalan Banteng	Sungai Bengkuang	0,52	94,65	99,69	64,95
94	Pangkalan Banteng	Sungai Kuning	1,69	94,05	98,68	64,81

**Keterangan :**

- Angka indeks Rentan Rawan Pangan (prioritas 1, 2 dan 3) **warna merah**
- Angka indeks Tahan Pangan (Prioritas 4, 5 dan 6) **warna hijau**

Lampiran 5. Peta per desa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat 2024.





BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY (NFA)

**PETA KETAHANAN DAN  
KERENTANAN PANGAN**  
*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN 2024**  
(Data Indikator Tahun 2023)

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan Pasir Panjang – Kumpai Batu No. 09 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74117  
e-mail: [dkp.kobar@gmail.com](mailto:dkp.kobar@gmail.com). Website : [dkp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://dkp.kotawaringinbaratkab.go.id)